



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN LKM-A  
HARAPAN BUNDO KEL. LUBUK LINTAH KEC. KURANJI KOTA  
PADANG**

**SKRIPSI**



**BAMBANG SAPUTRA  
07114081**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2014**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
LKM-A HARAPAN BUNDO KEL. LUBUK LINTAH KEC.  
KURANJI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

**OLEH  
BAMBANG SAPUTRA  
07114081**

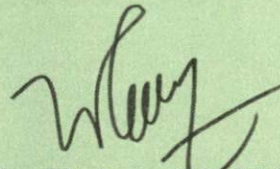
**MENYETUJUI:**

**Dosen Pembimbing I**



**Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc  
NIP. 195910311986031005**

**Dosen Pembimbing II**



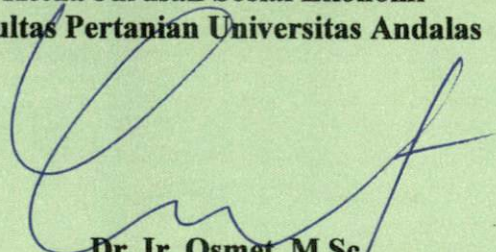
**Widya Fitriana, S.P. M.Si  
NIP. 198008302005012002**

**Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Andalas**



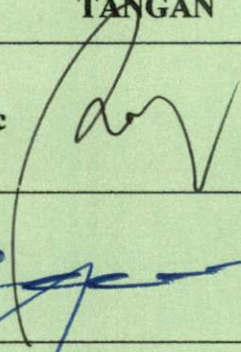

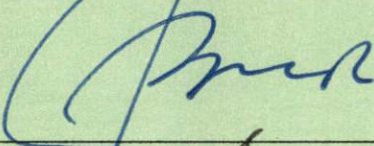
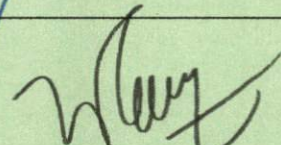
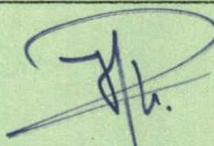
**Prof. Ir. H. Ardi, M. Sc  
NIP 195312161980031004**

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi  
Fakultas Pertanian Universitas Andalas**



**Dr. Ir. Osmet, M.Sc  
NIP.195510191987021001**

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 24 Juli 2014.

No	NAMA	TANDA TANGAN	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc		Ketua
2.	Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc		Sekretaris
3.	Prof. Ir. Yonariza, M.Sc. PhD		Anggota
4.	Widya Fitriana, S.P. M.Si		Anggota
5.	Rika Hariance, S.P. M.Si		Anggota



*Dari lubuk hati terdalam kupersembahkan  
Kepada Ibunda Sumiati dan Ayahanda Khairul  
atas perhatian, pengorbanan, dukungan dan semangat yang diberikan,  
serta terima kasih kepada adik-adikku Ivan Dinata, Feli Yulia Fitri dan Aditia  
Gunawan.*

## **BIODATA**

Penulis dilahirkan di Padang Tarab, Baso pada tanggal 25 Nopember 1988 sebagai anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Khairul dan Sumiati. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SD Negeri 32 Inpres Kumpulan (1995-2001). Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh di SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping, lulus pada tahun 2004. Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh di SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2007 penulis diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Program Studi Agribisnis.

Padang, Juli 2014

B.S

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan LKM-A Harapan Bundo Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang”. Penelitian ini didasarkan pada aplikasi ilmiah dari mata kuliah pokok Perbankan dan Kelembagaan Keuangan pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc, dan Widya Fitriana, S.P, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran, petunjuk, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc, Bapak Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, P.hD dan Ibu Rika Hariance, S.P. M.Si atas petunjuk dan saran yang diberikan. Kemudian ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

Harapan penulis semoga hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembangunan pertanian Indonesia kedepan.

Padang, Juli 2014

B.S

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Lembaga Keuangan Mikro .....	9
2.2 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) .....	13
2.3 Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) .....	16
2.4 Program Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) .....	21
2.5 Konsep Efektivitas Pelaksanaan Program.....	24
2.6 Tinjauan Tentang Kredit Pertanian .....	27
2.7 Analisis Rasio Keuangan .....	31
2.8 Konsep Pengelolaan Keuangan.....	33
2.9 Penelitian Terdahulu .....	34
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Waktu dan Tempat .....	36
3.2 Metode Penelitian .....	36
3.3 Teknik Pengambilan Responden.....	36
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	37

3.5 Topik Data.....	37
3.6 Analisis Data .....	38
3.7 Defenisi Operasional.....	44
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja LKM-A Harapan Bundo .....	46
4.2 Profil LKM-A Harapan Bundo .....	47
4.3 Deskripsi Pengelolaan Dana Program BLM PUAP di LKM-A Harapan Bundo .....	55
4.4 Efektivitas Pengelolaan Keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo ...	60
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b><u>Gambar</u></b>	<b><u>Halaman</u></b>
1. Jenis/ Bentuk LKM dan Pengembangan Keuangan Mikro .....	12
2. Komponen Modal LKM-A Harapan Bundo.....	51
3. Persentase Jumlah Anggota LKM-A Berdasarkan Jenis Usaha Produktif .....	52
4. Perkembangan Usaha Pembiayaan LKM-A Harapan Bundo (Januari s/d Desember 2013) .....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Anggota yang Memperoleh Bantuan Modal.....	38
2. Skala Nilai yang Digunakan Untuk Menilai Rasio Likuiditas .....	41
3. Skala Nilai yang Digunakan Untuk Menilai Rasio Solvabilitas .....	41
4. Skala Nilai yang Digunakan Untuk Menilai Rasio Profitabilitas .....	41
5. Skala Nilai yang Digunakan Untuk Menilai Rasio Produktivitas Penanaman Modal .....	41
6. Indeks Keuangan LKM-A Harapan Bundo Selama Satu Tahun (Januari s/d Desember 2013) .....	43
7. Matriks Efektivitas Pengelolaan Keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo .....	43
8. Proses Pembuatan Rencana Usaha Gapoktan Harapan Bundo .....	55
9. Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Dana BLM- PUAP.....	56
10. Syarat yang harus dipenuhi anggota LKM-A .....	59
11. Banyaknya Jumlah Anggota yang Memperoleh Bantuan Modal Usaha Selama Satu Tahun ( Januari s/d Desember 2013).....	61
12. Total Nilai yang Diperoleh dari Perhitungan Rasio Keuangan pada LKM-A Harapan Bundo pada Periode Januari s/d Desember 2013 .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1. Kuota Lokasi Penerima PUAP Menurut Provinsi Tahun 2008 .....	75
2. Rincian Gapoktan yang Menerima Dana BLM PUAP Tahap I.....	76
3. Daftar Nama dan Jumlah Anggota yang Kelompok Tani yang Terhubung dalam Gapoktan Harapan Bundo .....	77
4. LKM-A Terbaik pada Setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.....	78
5. Struktur Organisasi Gapoktan Harapan Bundo.....	79
6. Struktur Pengurus LKM-A Harapan Bundo .....	80
7. Neraca dan Laporan Laba/Rugi LKM-A Harapan Bundo per Desember 2013 .....	81
8. Keadaan Modal LKM-A Harapan Bundo per 31 Desember 2013.....	83
9. Jumlah Anggota LKM-A Harapan Bundo Menurut Jenis Usaha .....	84
10. Perkembangan Dana PUAP di LKM-A Harapan Bundo dari Bulan Januari s/d Desember 2013 .....	85
11. Rencana Usaha Bersama Gapoktan Harapan Bundo .....	86
12. Rencana Usaha Kelompok Saiyo Sakato .....	87
13. Rencana Usaha Kelompok Kandang Batu Sakato .....	88
15. Rencana Usaha Kelompok Kampuang Kalawi Timur .....	89
16. Contoh Surat Rekomendasi LKM-A.....	90
17. Contoh Surat Permohonan LKM-A .....	91
18. Contoh Surat Persetujuan LKM-A.....	92
19. Contoh Rencana Usaha Anggota LKM-A .....	93
20. Contoh Lampiran Rencana Usaha Anggota LKM-A.....	94
21. Contoh Surat Perjanjian Pinjaman .....	95
22. Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo per Bulan Selama Satu Tahun (Januari s/d Desember 2013).....	97
23. Rata-rata Besar Pinjaman yang Diterima oleh Anggota yang Memperoleh Bantuan Modal Usaha dari LKM-A Harapan Bundo (Januari s/d Desember 2013).....	101

24. Pendapatan yang Diterima dan Biaya yang Dikeluarkan oleh LKM-A Harapan Bundo Selama satu Tahun ( Januari s/d Desember 2013).....	102
25. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan LKM-A Harapan Bundo .....	104

# **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN LKM-A HARAPAN BUNDO KEL. LUBUK LINTAH KEC. KURANJI KOTA PADANG**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan di LKM-A Harapan Bundo Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang yang dilaksanakan pada bulan Juni s/d Juli 2014. Tujuan penelitian ini adalah : menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo dan masalah-masalah yang terkait dalam pengelolaan keuangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*). Data yang dikumpulkn terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisa secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian memaparkan bahwa: (1) pengelolaan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo tergolong pada kategori cukup efektif karena : (a) LKM-A mampu memberikan pembiayaan (bantuan modal) kepada anggota sebanyak 31 orang (96,88%) dalam satu tahun ( Januari s/d Desember 2013) dari total anggota pengguna dana berdasarkan realisasi awal pencairan dana BLM PUAP ( 32 orang) dengan total pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 10.635.000,- (b) akumulasi modal LKM-A Harapan Bundo tergolong pada kategori cukup sehat dan LKM-A Harapan Bundo mengalami kerugian dimana pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. (2) Permasalahan yang dihadapi oleh LKM-A Harapan Bundo dalam pengelolaan keuangan adalah keterbatasan dana yang tersedia, pembukuan keuangan yang kurang baik, proses pencairan dan pemanfaatan pinjaman.

LKM-A Harapan Bundo disarankan mampu mempercepat perputaran modal untuk dapat meningkatkan jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal dan menjalin kerja sama atau kemitraan dengan lembaga keuangan lain, dan pengelola hendaknya lebih selektif lagi dalam memutuskan pemberian pinjaman kepada anggota yang mengajukan permohonan dan mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuan sumber daya pengelola.

# **THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF LKM-A HARAPAN BUNDO IN LUBUK LINTAH, KURANJI SUB-DISTRIC, PADANG CITY**

## **Abstract**

This case study aims to analyze the effectiveness of financial management and to analyze problems faced by LKM-A harapan Bundo in managing its organization. Both primary and secondary data were collected, and then analyzed qualitatively and quantitatively.

Financial management of LKM-A Harapan Bundo is sufficiently effective. It is capable in providing micro-credit to 31 members (96,88% of total members) for 2013. The money for credit came from BLM-PUAP program. The total income from credit is IDR 0.635.000. Its capability in capital accumulation is good enough due to less revenue than the expense. The problems are experienced by LKM-A in financial management are less fund availability, poor financial accounting, unclear process of credit disbursement and utilisation.

It is suggested the LKM-A needs to accelerate capital turnover in order to increase credit for its members. It has to develop cooperation with other financial institutions for source of capital. It also need to streng then credit selection process for reducing non performing loan. The LKM-A has to train its staff for skill improvement.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk mencapai keadaan tersebut, selama ini pembangunan diprioritaskan pada sektor ekonomi, sedangkan sektor lain hanya bersifat menunjang dan melengkapi sektor ekonomi. Adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 telah menyadarkan semua pihak bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis serta andil yang sangat besar sebagai mesin penggerak, peredam gejolak dan penyangga perekonomian nasional. Berdasarkan PDRB riil, sektor pertanian juga menjadi kunci untuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan penyediaan lapangan kerja ( Departemen Pertanian, 2004).

Pengembangan sektor pertanian sampai saat ini telah banyak dilakukan di Indonesia. Selain sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan petani, sektor pertanian juga merupakan salah satu penggerak pembangunan nasional. Namun yang saat ini terjadi di Indonesia adalah munculnya masalah masalah pertanian seperti masalah kondisi petani, lemahnya organisasi petani dan masalah permodalan (Apriantono, 2004).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 jumlah penduduk miskin tercatat 32,53 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 20,65 juta jiwa berada di pedesaan dengan mata pencarian utama di sektor pertanian.

Pada umumnya petani di pedesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 Ha. Selain itu sebagian besar petani tersebut memiliki pendidikan formal yang rendah. Rendahnya pendidikan formal yang dimiliki petani menyebabkan pengetahuan terhadap pemakaian ataupun penyerapan informasi terhadap teknologi baru menjadi rendah sehingga produktivitas menjadi rendah pula. Kondisi petani seperti ini yang menyebabkan pertanian di Indonesia sulit untuk berkembang ( Kementrian Pertanian, 2011).

Permasalahan selanjutnya adalah lemahnya organisasi petani yang berada di pedesaan. Lemahnya organisasi ini disebabkan kurangnya kesadaran petani untuk berorganisasi. Salah satu organisasi yang berkembang di pedesaan dan memiliki

aktivitas simpan pinjam yang serupa dengan lembaga keuangan mikro adalah koperasi. Sebanyak 30 persen dari 138.000 koperasi di Indonesia hingga tahun 2011 belum aktif. Dari sisi volume usaha pun, perkoperasian di Indonesia juga sangat rendah. Saat ini baru 22 persen dari masyarakat Indonesia yang sudah dewasa tergabung dalam koperasi. Persentasi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kondisi di negara-negara maju. Di Amerika Serikat sebanyak 70 persen dan Singapura sebanyak 80 persen warganya yang sudah dewasa tergabung dalam koperasi (Anonim, 2011).

Permasalahan terakhir adalah sulitnya permodalan bagi petani. Masalah ini merupakan masalah yang sering terjadi dikalangan petani khususnya petani kecil. Hal ini disebabkan karena sistem perbankan yang kurang peduli kepada petani. Ditandai dengan sulitnya persyaratan administrasi untuk memperoleh modal, serta adanya jaminan yang memberatkan petani pada lembaga perbankan yang bersangkutan karena lembaga perbankan tidak mau mengambil resiko pada usaha kecil. Sedangkan kebanyakan petani kecil tidak memiliki jaminan yang sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh lembaga perbankan. Untuk mendapatkan modal atau kredit dari lembaga keuangan formal (perbankan), masyarakat langsung dihadapkan pada persyaratan formal administrasi. Persyaratan formal administrasi ini antara lain adanya persyaratan jaminan atau agunan (*collateral*). Persyaratan yang demikian pada umumnya tidak atau belum dimiliki oleh pengusaha kecil. Pada umumnya aset yang mereka miliki terutama aset fisik seperti tanah, rumah dan lain sebagainya, belum memiliki sertifikat. Sebagian dari mereka tidak memiliki aset fisik yang bisa disertifikatkan, dan walaupun ada nilainya sangat kecil. Hal lainnya yang memberatkan adalah mekanisme perbankan yang menurut penduduk pedesaan menyulitkan, sangat birokratif, dan biaya transaksi mahal. Sementara bagi lembaga keuangan formal sendiri hampir tidak masuk akal melakukan transaksi dengan skala mikro karena jelas akan menyebabkan tingginya biaya transaksi dan transaksi dengan sektor usaha yang penuh resiko tidak bisa dibenarkan. Walaupun pemerintah telah memberikan subsidi dalam bentuk suku bunga rendah, namun tetap menjadi mahal apabila semua biaya diperhitungkan seperti : adanya biaya administrasi, biaya transaksi, jangka waktu yang lama, bunga bank yang sudah ditentukan

kadang terdapat denda bunga akumulatif apabila nasabah menunggak pembayaran/angsuran (Setyarini, 2008).

Selain masalah akses, rendahnya nilai pinjaman biasanya tidak disertai dengan kemudahan dan pelayanan mengenai ketepatan waktu dan ketepatan jumlah, sebab kemudahan dan pelayanan memerlukan biaya, adakalanya lembaga-lembaga tersebut memberikan kesempatan meminjam pada waktu-waktu tertentu saja, dan nasabah atau calon nasabah harus datang sendiri untuk menerima dan membayar pinjamannya. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan misalnya harus ada surat rekomendasi dari pejabat atau instansi tertentu yang akan menambah biaya biaya perolehan kredit, sehingga kredit kecil akan mejadi relatif mahal. Hal ini yang menyebabkan sebagian besar petani kecil lebih tertarik meminjam padatengkulak (Setyarini, 2008)

Dengan permasalahan permasalahan seperti diatas, maka pemerintah mencanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) mempunyai beberapa tujuan yang tertulis pada pedoman PUAP (2010), yaitu ; (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis dipedesaan sesuai dengan potensi wilayah. (2) meningkatkan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gabungan Kelompok Tani(Gapoktan), Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani. (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan (Departemen Pertanian, 2009).

Sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani di pedesaan, Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 telah menetapkan gapoktan merupakan format final dari organisasi ditingkat petani dipedesaan yang didalamnya terkandung fungsi – fungsi pengelolaan antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan saprodi dan unit kelembagaan keuangan mikro. Melalui Permentan 273 Kemetrian Pertanian telah menetapkan dan mewadahi gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani serta sekaligus menentukan arah pembinaan kelembagaan petani dipedesaan.Gapoktan

penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP, diarahkan untuk dibina dan ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu unit usaha Gapoktan (Departemen Pertanian, 2009).

Penumbuhan LKM-A pada Gapoktan merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani mikro dan buruh tani yang selama ini sulit mendapatkan pelayanan keuangan melalui lembaga keuangan formal. Sebagai langkah pemberdayaan LKM-A dimaksudkan untuk ; (1) memberikan kepastian pelayanan dan kemudahan akses petani pada fasilitas pembiayaan; (2) prosedur yang sederhana dan cepat; (3) kedekatan lokasi pelayanan dengan tempat usaha tani; (4) pengelola LKM-A sangat memahami karakter petani sebagai nasabah (Kementrian Pertanian, 2011).

Pengembangan LKM dilingkungan Gapoktan mempunyai nilai strategis diantaranya, adalah : (1) penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan cara berkelanjutan, dan tidak berbasis pada *charity*; (2) proporsi terbesar orang miskin (92,7%) adalah pengusaha mikro; (3) kebutuhan terbesar pengusaha mikro adalah akses pada pelayanan keuangan; (4) bank tidak mungkin mampu langsung mencapai usaha mikro kecuali melalui LKM; (5) di Indonesia, keuangan mikro sudah mempunyai sejarah panjang; dan (6) rakyat sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro (potensi simpan dan pembiayaan) (Departemen Pertanian, 2009).

Melalui penerapan nilai strategis dan pengelolaan keuangan yang efektif oleh LKM-A diharapkan dana stimulant bantuan modal usaha dapat mempermudah akses anggota terhadap sumber permodalan (Departemen Pertanian, 2009).

Pengelolaan Keuangan pada Gapoktan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan di tingkat pengurus. Sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan, pencatatan keuangan bertujuan untuk ; (1) meningkatkan tata cara pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis dilapangan; (2) mengetahui tata cara penggunaan dana; (3) dalam tahap awal dapat diketahui tingkat efisiensi atau adanya penyimpangan dalam penggunaan dana; (4) memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan kepada pihak eksternal terutama mempersiapkan gapoktan masuk pada jaringan *Linkages* program dari

bank/ lembaga keuangan; (5) memudahkan badan/tim pengawas dalam melakukan pemeriksaan dalam penggunaan uang organisasi (Kementrian Pertanian, 2010).

Pengukuran pengelolaan LKM-A dilakukan mengingat bahwa sering terjadi permasalahan pada Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. masalah yang sering terjadi pada LKM ini antara lain kebanyakan LKM milik pemerintah, LKM proyek, maupun LKM-LSM menghadapi persoalan mengenai keberlanjutan aktivitasnya. Ketidakmampuan tersebut biasanya disebabkan oleh bermacam-macam faktor antara lain; (1) ketergantungan dukungan baik dari pemerintah ataupun donor; (2) hanya merupakan proyek yang didesain sementara waktu; (3) ketiadaan system keuangan mikro yang memadai, dan (4) ketidakmampuan beradaptasi dengan situasi pasar yang ada. Menghadapi masalah ini, maka perlu diingat bahwa aktifitas keuangan mikro hanya akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) dan rakyat miskin apabila pelayanan keuangan yang diberikan dapat berlanjut (Ismawan,2003). Rendahnya kinerja lembaga keuangan mikro dapat dilihat dari aspek (1) rendahnya tingkat pelunasan kredit, (2) rendahnya moralitas aparat pelaksana, (3) rendahnya mobilisasi dana masyarakat (Martowijoyo, 2002).

Pengukuran pengelolaan keuangan LKM-A dilakukan untuk beberapa pertimbangan yaitu : (a) mengukur tingkat keberhasilan dari proses pendampingan terkait dengan pengelolaan keuangan. Proses pendampingan ini secara nyata ditunjukkan adanya peningkatan kemampuan pengurus Gapoktandalam mengelola keuangan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan didasarkan pada AD/ART dan standar manajemen keuangan yang telah ditetapkan; (b) mengukur proses pencatatan dan pelaporan keuangan , untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan (Kementrian Pertanian, 2010) .

Berdasarkan pada hal-hal diatas, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, agar dapat di gambarkan fungsi dan kerja yang dilakukan LKM-A melalui pengelolaan keuangannya dan juga setelah diketahui kondisi pengelolaan keuangan tersebut maka LKM-A bisa mengambil kebijakan untuk pengembangan LKM-A kedepannya dalam penyaluran dan pengumpulan dana sehingga hal ini akan membantu dalam menjangkau anggota yang sulit memperoleh akses terhadap permodalan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh petani dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Padahal ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan modal merupakan syarat mutlak dalam usaha pertanian sehingga usaha dapat berjalan dengan optimal dan tumbuh berkembang secara progresif dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani (Setyarini, 2008).

Untuk membantu petani dalam permodalan, maka pemerintah memberikan bantuan dana kepada petani berupa Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) yang disalurkan kepada Gapoktan dan selanjutnya Gapoktan menyerahkan pengelolaan dana tersebut kepada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). LKM-A adalah lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh Gapoktan penerima dana PUAP dan memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana PUAP kepada anggota (Departemen Pertanian, 2009).

Idealnya, pengelolaan bantuan modal usaha ini pada intinya harus menciptakan surplus usaha dan dikelola oleh LKM-A sebagai banknya para petani dengan menggunakan prinsip; (1) mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat petani sebagai kelompok sasaran; (2) dikelola oleh masyarakat secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan; (3) memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis; (4) hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri; (5) pengelolaan dana dan pelestarian dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas (Sumodiningrat *et.al.* 2003).

Penumbuhan LKM-A dimaksudkan untuk memberikan kepastian pelayanan serta kemudahan akses petani pada fasilitas pembiayaan, prosedur yang sederhana dan cepat, kedekatan lokasi pelayanan dengan tempat usaha petani, dan pengelola LKM-A sangat memahami karakter petani sebagai nasabah (Kementrian Pertanian, 2010). Salah satu sumber dana LKM-A berasal dari dana BLM-PUAP. Di Indonesia, PUAP telah dilaksanakan di 20.426 desa/Gapoktan sejak tahun 2008. Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2008 merupakan salah satu

provinsi penerima dana bantuan PUAP diantara 33 provinsi penerima bantuan PUAP dengan kuota sebanyak 208 Gapoktan oleh Departemen Pertanian (Lampiran 1). Dari 12 kabupaten dan kota yang ada di provinsi ini, Kota Padang salah satu kota penerima BLM PUAP dengan kuota sebanyak 7 Gapoktan. Gapoktan Harapan Bundo merupakan salah satu diantara Gapoktan Penerima BLM PUAP di Kota Padang (Lampiran 2).

Gapoktan Harapan Bundo berdiri atas kemauan dan kesepakatan kelompok-kelompok tani yang ada di kelurahan tersebut yang menjadi cermin solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi para petani dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi petani pada daerah tersebut. Gapoktan Harapan Bundo didirikan pada tanggal 7 januari 2008 di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang yang di ketuai oleh Yulisman S.P, dengan jumlah Kelompok Tani(Poktan) yang tergabung sebanyak 3 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 92 orang (Lampiran 3).

LKM-A Harapan Bundo difungsikan oleh Gapoktan Harapan Bundo sebagai unit usaha yang mengelola khusus pembiayaan dan permodalan bagi anggota-anggotanya. LKMA Harapan Bundo merupakan penyalur dana kepada anggota Gapoktan Harapan Bundo berdasarkan RUB dan RUK yang telah disusun. Dana disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman dan kemudian digulirkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. Pinjaman ini dapat di peroleh dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh LKM-A dan Gapoktan Harapan Bundo.

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo dan masalah – masalah apa saja yang terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan LKM-A Harapan Bundo Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan utama yaitu :

Menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo dan permasalahan yang terkait dalam pengelolaan keuangan tersebut.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi :

1. Pemerintah, sebagai bahan evaluasi terhadap program yang sedang dijalankan, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan program-program dimasa yang akan datang, khususnya program penguatan modal atau pembiayaan pertanian, serta penumbuh kembangan dan memberdayakan LKM-A.
2. LKM-A Harapan Bundo, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi LKM-A dalam menjalankan usaha-usahnya, sehingga dapat lebih berkembang dan mandiri.
3. Mahasiswa dan atau peneliti selanjutnya, penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah bahan referensi dalam membahas lebih dalam tentang pembiayaan pertanian dan LKM-A.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Lembaga Keuangan Mikro

Defenisi lembaga keuangan menurut UU No. 14/1976 pasal 1 tentang Pokok-pokok perbankan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat (Suyatno, T *et al.* 2007).

Departemen Pertanian (2009) mendefenisikan Lembaga Keuangan Mikro adalah sistem intermediasi keuangan pada level mikro baik formal maupun non formal yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya, dalam rangka mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Asian Development Bank (ADB) dalam Ashari (2006) mendefenisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro. Berdasarkan fungsinya, maka jasa keuangan mikro dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro memiliki ragam yang luas yaitu dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya.

Kuangan mikro kini dianggap sebagai terobosan institusional untuk melayani pembiayaan masyarakat pedesaan, perkotaan dan para pengusaha mikro. Keuangan mikro supaya terfokus, professional dan efektif secara luas dalam melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan oleh LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Hal ini dikarenakan; (1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/pelaku ekonomi di desa. (2) Petani/masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur. (3) Karakteristik usahatani umumnya membutuhkan platform kredit yang tidak

terlalu besar, sehingga sesuai dengan kemampuan financial LKM. (4) Dekatnya lokasi LKM dan memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani, sehingga dapat mengucurkan kredit seraca tepat waktu dan jumlah. (5) Adanya keterkaitan sosial-kultural serta hubungan yang bersifat personal emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian kredit (Ashari, 2006).

Pengembangan LKM dilingkungan Gapoktan mempunyai nilai strategis diantaranya, adalah :

- a. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan cara berkelanjutan, dan tidak berbasis pada charity.
- b. Proporsi terbesar orang miskin (92,7%) adalah pengusaha mikro
- c. Kebutuhan terbesar pengusaha mikro adalah akses pada pelayanan keuangan
- d. Bank tidak mungkin mampu langsung mencapai usaha mikro kecuali LKM
- e. Di Indonesia, keuangan mikro memiliki potensi untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro (potensi simpan dan pembiayaan) (Departemen Pertanian, 2009).

Apabila LKM dapat berkembang menjadi kuat dan luas, akan dapat memberikan manfaat kepada para anggotanya pada khususnya dan masyarakat miskin pedesaan pada umumnya, antara lain: (a) keluarga miskin pelaku usaha mikro, dapat memperoleh pelayanan keuangan untuk modal usaha dan terhindar dari rentenir; (b) surplus dari pendapatan LKM akan kembali kepada anggota; (c) ada mobilisasi dan pemanfaatan sumber ekonomi pedesaan; (d) meningkatkan produktifitas pedesaan; (e) ada perubahan budaya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dari pola defisit menjadi pola surplus; (f) membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan dipedesaan; (g) masyarakat miskin dapat mengambil keputusan-keputusan pembangunan; (h) membangun kemandirian dan keswadayaan masyarakat; (i) membangun kepercayaan diri dan memperkuat posisi tawar; (j) mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan; (k) merangsang tumbuhnya jiwa kewirausahaan; (l) membangun kehidupan bersama yang dijiwai oleh rasa persaudaraan, semangat kesetiakawanan dan kegotongroyongan; dan (m) membangun kebiasaan menabung secara disiplin dalam rangka mengakumulasi aset keluarga (Departemen Pertanian, 2009).

Karakteristik LKM menurut Departemen Pertanian (2009) yaitu :

1. Mandiri

Swadaya dan mampu membiayai usahanya sendiri.

2. Profesional

- a. Dikelola dengan penuh waktu, bukan pekerjaan sambilan,
- b. Adanya fasilitas pendampingan dan pelatihan berjenjang dilengkapi modul-modul aplikatif.
- c. Produk simpanan dan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (*deman's deiven*),
- d. Menerapkan sistem, prosedur administratif dan akuntansi standar lembaga keuangan yang dirancang sederhana, efisien, dan efektif,
- e. pengelolaan dan laporan keuangan secara terbuka.

3. Mengakar di masyarakat

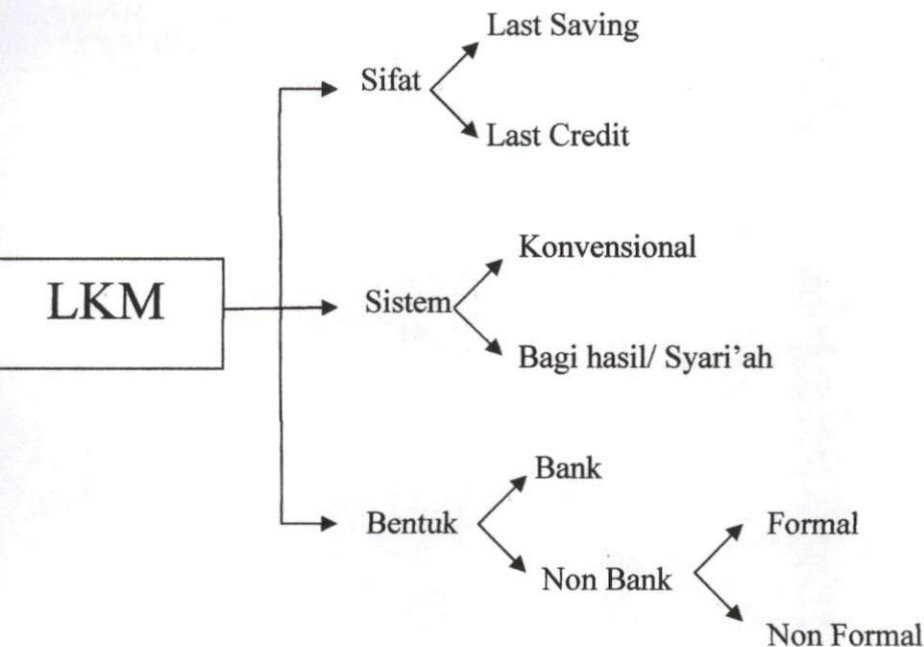
Diinisiasi, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat sehingga akan tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab (*sense of belonging and responsibility*).

Sedangkan ciri – ciri LKM yang sehat antara lain :

- a) Jumlah kekayaan produktif minimal 80% terhadap seluruh kekayaan dengan ketentuan :
  - i) Maksimum khas berupa uang tunai ditambah tabungan lancar di Bank tidak melebihi 5% dari seluruh kekayaan.
  - ii) Maksimum harta tetap tidak melebihi 15% dari seluruh kekayaan.
- b) Jumlah modal sendiri tidak kurang 25% terhadap seluruh jumlah kekayaan.
- c) Tingkat pertumbuhan kekayaan pertahun harus lebih besar dari tingkat inflasi.
- d) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk seorang anggota tidak melebihi 25% dari nilai modal sendiri LKM.
- e) Utang kepada Bank atau pihak ketiga lainnya maksimum 75% terhadap jumlah kekayaan.
- f) Jumlah kekayaan lancar minimum 120% terhadap kewajiban lancar yang harus dibayar.

- g) semua aspek dan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, evaluasi) LKM berjalan baik.
- h) Jangkauan layanan pinjaman merata. Minimal 65% dari jumlah seluruh anggota masih memiliki sisa pinjaman.
- i) LKM memperoleh tingkat pendapatan lebih besar dibandingkan rata-rata bunga deposito Bank.
- j) Biaya operasional maksimum 50% terhadap pendapatan operasional. Pendapatan operasional adalah penerimaan bunga kredit dikurangi beban biaya dana dari utang pihak ketiga maupun anggota dalam setahun.
- k) Tunggakan maksimum 5% terhadap sisa kredit anggota dan tidak lebih dari separonya berada pada posisi diragukan dan macet (Departemen Pertanian, 2009).

Jenis/Bentuk LKM dan Pengembangan Keuangan Mikro menurut Departemen pertanian(2009).



Gambar 1. Jenis/Bentuk LKM dan Lembaga Pengembangan Keuangan Mikro

LKM yang sifatnya last saving adalah LKM yang menjalankan fungsi intermediasinya disamping memberikan pembiayaan kepada anggotanya juga melaksanakan fungsi pengumpulan dana masyarakat sebagai pihak ke-3,

sedangkan last kredit adalah LKM yang hanya menjalankan fungsi pembiayaan/pinjaman tanpa melakukan penghimpunan dana masyarakat.

Sedangkan menurut sistemnya LKM konvensional adalah LKM yang dalam operasionalnya masih menggunakan bunga sebagai instrumen atau sistem utamanya, sedangkan LKM dengan sistem bagi hasil/syari'ah adalah LKM yang tidak menggunakan bunga dalam sistem operasional karena beranggapan sistem bunga merupakan sistem yang tidak adil.

## **2.2 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)**

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis(LKM-A) adalah Lemabaga Keuangan Mikro yang didirikan dan dimiliki oleh petani/masyarakat tani dipedesaan guna memecahkan masalah atau kendala akses untuk mendapatkan pelayanan kredit/pembiayaan dan simpanan dilingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis (Kementrian Pertanian, 2010).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnin (LKM-A) merupakan sebagai penyedia jasa keuangan mikro bagi petani, pengusaha kecil, dan mikro di pedesaan. LKM-A melakukan kegiatan jasa keuangan dalam bentuk pembiayaan/kredit, pinjaman atau pembiayaan dan pelayanan jasa lainnya (Kementrian Pertanian, 2010).

Karakteristik LKM-A dalam memberikan pelayanan keuangan yaitu :

1. Tidak menggunakan pola pembiayaan keuangan perbankan,
2. Melaksanakan pelayanan kredit/pembiayaan dengan mensyaratkan adanya peminjaman non agunan dan melakukan penghimpunan simpanan/tabungan kelompok,
3. Pengelolaan asset yang transparan serta menerapkan proses administrative yang mudah dipahami oleh petani dan bertanggung jawab (kementrian Pertanian, 2010).

Unit usaha LKM-A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi Gapoktan PUAP. Untuk dapat menumbuhkembangkan LKM-A sebagai lembaga keuangan yang professional dan dapat melayani dan mengelola dana secara transparansesuai kaedah-kaedah keuangan mikro. Gapoktan PUAP harus dapat memisahkan kepengurusan dengan pengelolaan unit usaha LKM-A (Kementrian Pertanian, 2010).

Pengelola LKM-A merupakan “Direksi” yang dipilih dan ditugaskan oleh “Dewan Komisaris(pengurus Gapoktan)” untuk menjalankan kelembagaan keuangan dalam rangka mengelola dan melayani pembiayaan petani untuk menghasilkan laba bagi kepentingan semua anggota Gapoktan.

Menurut Kementrian Pertanian(2010), kriteria pemilihan pengelola LKM-A adalah : (1) mempunyai pendidikan formal minimal setara Diploma III/Strata I, sanggup bekerja penuh, memiliki landasan iman, dan sikap keikhlasan, serta mampu bekerja sama dengan pihak lain dalam menumbuhkan LKM-A; dan (2) bersedia, cukup waktu dan mampu mengelola LKM-A.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendiri dan pengelola dalam pengelolaan terhadap LKM-A antara lain :

#### 1. Pendiri

Dalam pendirian LKM-A diperlukan adanya pendiri, terdapat beberapa criteria yang digunakan dalam memilih calon pendiri :

- a) Petani anggota Gapoktan PUAP yang memiliki kesetiakawanan kelompok yang tinggi, dilandasi oleh rasa persaudaraan dan kebersamaan serta semangat untuk membela kepentingan petani kecil,
- b) Tokoh-tokoh masyarakat, pemuda tani, ulama, serta petani yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup sehingga dapat menitipkan dana sebagai tambahan modal awal pendirian LKM-A.

#### 2. Pengelola

Pada tahap awal pembentukan LKM-A diperlukan paling sedikit tiga orang pengelola yang masing – masing bertanggung jawab untuk mewujudkan kerja sama manajemen yang rapi dan terpadu dengan pembagian tanggung jawab antara lain :

- a) Mengenalkan dan memobilisasi dana simpanan anggota, dan masyarakat sekitar,
- b) Pembiayaan kegiatan usaha – usaha petani anggota/kelompok tani dan Pembinaan pada keberhasilan usaha – usaha anggota,
- c) Pembukuan, penataan administrasi, kelembagaan dan sumber daya manusia.

Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sebagai pengelola LKM-A antara lain :

- i. Pengelola harus bekerja secara professional, mempunyai komitmen penuh dalam waktu dan sepenuh hati dalam mengembangkan LKM-A,
- ii. Memiliki motivasi yang kuat, amanah, ikhlas, sabar, dan istiqamah,
- iii. Memiliki sikap dan perilaku yang dapat diterima oleh petani anggota maupun masyarakat sekitar,
- iv. Jujur dan amanah, serta mampu mengayomi semua kepentingan petani dalam mengembangkan usaha pertanian.

Tugas dan tanggung jawab pengelola adalah untuk mewujudkan kerjasama, manajemen yang rapi terpadu dengan pembagian tanggung jawab antara lain : (a) mengarahkan dan memobilisasi dana simpanan anggota; (b) menyusun kebijakan penyaluran pembiayaan terhadap usaha – usaha anggota; (c) membuat standar pembukuan, administrasi, kelembagaan dan SDM (Kementrian Pertanian,2010).

Untuk pelaksanaan pelayanan kepada anggota, pengelola atas persetujuan pada musyawarah/rapat anggota dapat menentukan salah satu dari sistem pelayanan sebagai berikut :

#### 1. Prinsip Pelayanan Syari'ah

Pelayanan anggota dengan menggunakan prinsip dasar syari'ah atau bagi hasil antara LKM-A dengan para pihak yang terkait dengan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan dengan penyertaan modal (*Musyarakah*) dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*).

#### 2. Prinsip Pelayanan Konvensional

Pelayanan anggota dengan menggunakan prinsip konvensional adalah pelayanan pemberian pinjaman dan penyediaan jasa – jasa kredit terkait dengan pelayanan kebutuhan anggota dengan menggunakan sistem bunga (Kementrian Pertanian, 2010).

Dalam menjalankan fungsinya LKM-A membutuhkan adanya sebuah dasar hukum. Kerangka hukum dan pengaturan pelayanan keuangan mikro/LKM-A dibutuhkan dalam rangka :

- a. Melindungi kepentingan petani dan masyarakat tani yang menyimpan uang di LKM-A
- b. Sebagai asas legalitas dalam upaya melindungi operasionalisasi LKM-A
- c. Sebagai asas legalitas mengembangkan pola jejaring usaha dengan lembaga keuangan lainnya
- d. Penguatan serta pengembangan usaha LKM-A.

Dasar hukum operasional LKM-A yang disarankan adalah : (1) UU No.25/1992 tentang perkoperasian, yang dijabarkan dalam PP RI Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; dan (2) Peraturan Daerah untuk memayungi sementara operasionalisasi LKM-A, menuju pembentukan dasar hukum koperasi.

### **2.3 Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)**

Ruang lingkup petunjuk teknis penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), antara lain : (1) kelembagaan dan organisasi; (2) proses dan strategi penumbuhan; (3) penguatan kapasitas pengelolasn LKM; (4) pendampingan dan pembinaan; (5) monitoring dan evaluasi ( Kementrian Pertanian, 2010).

Agar LKM-A dapat berkembang, tumbuh menjadi kuat dan lestari dalam memberikan pelayanan keuangan kepada anggota, maka lembaga ini perlu memegang teguh dan melaksanakan prinsip – prinsip yang telah teruji sebagai berikut :

- a. Modal LKM-A haruslah bersumber dari anggotanya sendiri (swadaya), yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib (dapat ditambah dengan simpanan pokok khusus atau “modal penyertaan” sebagai penguat modal, dengan perlakuan seperti investasi anggota pada lembaga keuangan). Selain itu LKM-A dapat membuka berbagai jenis tabungan (simpanan sukarela).
- b. Agar anggota LKM-A mempunyai rasa memiliki yang tinggi, anggota harus dimotivasi oleh pengurus Gapoktan dan pengelola LKM-A untuk

mempunyai simpanan pokok khusus. Simpanan pokok khusus ini sama halnya dengan penanaman saham pada lembaga keuangan formal seperti bank.

- c. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Tidak ada paksaan untuk menjadi anggota tanpa membedakan suku, jenis kelamin, agama dan kedudukan sosial lainnya.
- d. Layanan kredit/pinjaman/pembiayaan/ hanya diberikan kepada anggota LKM-A saja, tidak boleh kepada bukan anggota.
- e. Mengembangkan pelayanan yang bermutu dan profesional, berorientasi pada fungsi bisnis dan sosial.
- f. Dapat menghargai jasa, kemampuan dan produktifitas secara layak dan rasional.
- g. Saling percaya. Setiap anggota harus mengembangkan sikap untuk dapat dipercaya, menepati janji dan dapat mempercayai orang lain.
- h. Kepemimpinan demokratis ditandai oleh : (i) setiap anggota mempunyai kedudukan sama, satu orang satu suara; (ii) anggota berhak mengajukan usul yang harus diperhatikan oleh pengurus; (iii) pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota didalam rapat anggota pendiri; (iv) manajemen diselenggarakan terbuka. Setiap anggota berhak mengetahui dan memperoleh informasi secara berkala.
- i. Berusaha untuk mencapai skala ekonomi atau volume usaha yang layak yang menjamin perolehan pendapatan, untuk membiayai pelayanan profesional kepada para anggota, pertumbuhan dan kelestarian.
- j. Mengalokasikan sumber dana yang diperoleh dari pendapatan untuk kegiatan pendidikan secara terus menerus bagi anggota dan keluarganya.
- k. Membangun jaringan kerja sama antar LKM-A dan lembaga lain yang lebih luas atas dasar saling menghargai dan saling mengembangkan.
- l. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota harus diikuti dengan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.
- m. Jaminan barang boleh diterapkan, namun pertimbangan yang etraik tetap atas watak/karakter peminjam sendiri dan kelayakan usahanya.

Menurut Kementerian Pertanian (2010), penumbuhan LKM-A dari Gapoktan penerima dana BLM PUAP, dilakukan melalui proses dan tahapan- tahapan antara lain :

- a. Identifikasi awal profil Gapoktan
- b. Validasi profil
- c. Seleksi kelayakan Gapoktan yang mempunyai potensi ditumbuhkan menjadi LKM-A
- d. Transformasi penumbuhan gapoktan menjadi LKM-A
- e. Implementasi, operasionalisasi dan pengembangan.

### **2.3.1 Tahap Identifikasi**

Dalam rangka penumbuhan LKM-A pada Gapoktan PUAP, diperlukan tahapan identifikasi sebagai tahapan pendahuluan untuk menentukan kapasitas organisasi Gapoktan yang secara teoritis mempunyai prospek untuk dikembangkan menjadi LKM-A.

Identifikasi Gapoktan dilakukan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode pemeringkatan (rating) gapoktan PUAP yang telah disiapkan Kementerian Pertanian.

Untuk melakukan identifikasi Gapoktan PUAP yang dapat ditransformasikan menjadi LKM-A, maka terdapat beberapa indicator yang dapat digunakan sebagai alat bantu identifikasi antara lain :

#### **1. Pengukuran aspek Organisasi**

Kapasitas Gapoktan yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah: (a) aturan (AD/ART) yang sudah dimiliki; (b) pelaksanaan dan pengorganisasian rapat-rapat; (c) tingkat kehadiran anggota; (d) pengikatan anggota dalam bentuk simpanan; (e) peningkatan jumlah anggota; (f) pendidikan anggota dan pengurus; dan (g) mekanisme pengawasan dan pengendalian.

#### **2. Tatalaksana dan Pembukuan Gapoktan**

Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang menangani fungsi pelayanan keuangan dan ditransformasikan menjadi LKM-A, maka ukuran tatalaksana pembukuan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah;

(a) pemanfaatan dana PUAP; (b) pembukuan dan manajemen keuangan; dan (c) media informasi kelembagaan untuk pelayanan anggota.

### 3. Kinerja Gapoktan sebagai embrio LKM-A

Sebagai embrio lembaga keuangan, maka kapasitas dan kinerja Gapoktan yang dijadikan bahan pertimbangan adalah; (a) dana keswadayaan; (b) sarana dan prasarana kantor/tempat usaha; (c) kemampuan gapoktan dalam mengoptimalkan dana masyarakat; dan (c) media informasi kelembagaan untuk pelayanan anggota.

Dalam tahapan identifikasi juga dilakukan tahap kelengkapan persyaratan administrasi Gapoktan sebagai berikut :

- a. Gapoktan menyampaikan persyaratan administrasi kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota antara lain : profil Gapoktan, laporan keuangan dalam format yang sederhana dan hasil musyawarah Gapoktan untuk bersedia mengelola aset dari dana BLM, BPLM dan PMUK menjadi LKM-A.
- b. Gabungan Kelompok Tani yang ditetapkan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Pusat.

### 2.3.2 Tahap Validasi Profil Gapoktan

Tahap validasi ini dilakukan setelah informasi teoritis diperoleh dari laporan kelompok maupun Dinas lingkup pertanian mengenai profil umum kelompok, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi atas informasi – informasi tersebut melalui kunjungan lapangan. Pada saat ini ditanyakan pengetahuan kelompok (pengurus dan anggota) mengenai aspek – aspek yang berkaitan dengan LKM.

### 2.3.3 Tahap Seleksi Kelayakan dan Potensi LKM-A

Setelah hasil wawancara terkumpul maka tahap ini dilakukan. Untuk melakukan seleksi secara cepat dan teoat serta objektif, diperlakukan simulasi untuk menentukan kelayakan suatu Gapoktan yang dapat direkomendasikan atau tidak untuk ditarnsformasikan menjadi LKM-A.

Pertimbangan yang dilakukan selain kematangan dan keinginan kelompok untuk dijadikan LKM-A, juga perlu diperhatikan keberadaan LKM-A lainnya diwilayah tersebut sehingga tidak saling berkompetisi.

### 2.3.4 Tahap Transformasi Gapoktan menjadi LKM

Tahapan transformasi merupakan tahapan lanjutan setelah Gapoktan yang memenuhi persyaratan sebagai Gapoktan Utama yang layak ditransformasikan dan merupakan tahapan paling awal dalam pembentukan LKM-A. Untuk itu, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut:

#### a. Sosialisasi LKM-A

Tim teknis Kabupaten/Kota bersama dengan PMT melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terutama kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan, dengan menitikberatkan pada pemahaman tentang pentingnya pengelolaan asset dari dana BLM-PUAP secara berkelanjutan dalam format LKM-A.

#### b. Musyawarah/Rapat Anggota

Difasilitasi oleh Tim teknis Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/LSM memfasilitasi pertemuan calon Gapoktan PUAP untuk umenentukan arah dan pengelolaan LKM-A untuk mencapai kesepakatan dalam; (1) Penggunaan dana dari asset Gapoktan serta penetapan besaran dan pengumpulan dana swadaya anggot, serta penyediaan dana dari calon pendiri sebagai dana awal pendirian LKM-A; (2) sejalan dengan hal tersebut kegiatan yang harus dilakukan yaitu sosialisasi kepada anggota kelompok mengenai pentingnya mendirikan LKM-A, musyawarah anggota tentang pendirian LKM-A, pemilihan pendiri, pengurus dan pengelola; (3) menentukan dan menetapkan struktur pendiri, penguurus dan pngelola LKMA.

### 2.3.5 Tahap Implementasi dan Pengembangan LKM-A

Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir dari sebuah proses pembentukan atau pendirian LKM-A untuk itu terdapat beberapa kegiatan kunci dalam proses penumbuhan kemampuan operasional LKM-A yaitu :

#### (a) Pendampingan

Untuk memberikan efek kepercayaan bagi pengurus dan pengelola LKMA yang baru, maka aspek pendampingan sangat menentukan keberlanjutan. Untuk itu pendamping yang berpengalaman dalam penumbuhan lembaga sangat diperlukan.

(b) Magang kepada LKM yang sudah berjalan

Belajar dari LKM yang sudah berjalan dengan baik merupakan salah satu langkah yang diperlukan bagi pengurus dan pengelola.

(c) Penguatan dan peningkatan Liquiditas/ modal

Dalam menjalankan LKM-A diperlukan modal tambahan dari pihak luar, baik dari pemerintah maupun swasta (saham dari masyarakat sekitar).

(d) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi perkembangan LKM-A sangat diperlukan dengan tujuan untuk melihat kinerja LKM-A.

#### **2.4 Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan BLM-PUAP**

Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk pengembangan usaha agribisnis pedesaan adalah bagian pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian sasaran (Departemen Pertanian, 2008)

PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha bagi petani anggota, petani penggarap, butuh tani maupun rumah tangga tani yang dikooedinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk menyalurkan bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai tujuan yang maksimal Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. Melalui pelaksanaan PUAP diharapkan Gapoktan dapat menjadi kelembagaan petani yang dikelola dan dimiliki oleh petani (Kementrian Pertanian, 2011).

PUAP bertujuan untuk : (1) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis; (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani; (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam akses permodalan (kementrian Pertanian, 2011).

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut; (1) berkembangnya usaha agribisnis didesa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian; (2) berkembangnya

Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi; (3) meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin, petani/peternak ( pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani: dan (4) berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Indikator keberhasilan *output* pemberdayaan masyarakat melalui PUAP adalah :

- a. Tersalurkannya dana BLM-PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tanggani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian;
- b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (Kementrian Pertnian, 2011).

Indicator keberhasilan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
- b. Meningkatkan jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;
- c. Meningkatnya aktivitas kegiatan usaha agribisnis(hulu,budidaya dan hilir) dipedesaan; dan
- d. Meningkatnya pendapatan petani( pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai potensi daerah (Kementrian Pertanian, 2011).

Indikator Benefit dan Impact antara lain :

- a. Berkembang usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani dilokasi desa PUAP
- b. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani dipedesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani
- c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran dipedesaan.

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP.

2. penguata modal petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga miskin kepada sumber permodalan
3. Optimasi potensi Agribisnis di desa miskin dan tertinggal
4. Pendampingan bagi Gapoktan (Kemetrian Pertanian, 2011).

Strategi Operasional PUAP adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui
  - a. Pelatihan bagi petugas Tim Teknis Kecamatan, Kabupaten/Kota sebagai pendamping dan pembinan PUAP;
  - b. Rekrutmen dan pelatihan bagi Penyuluh dan PMT;
  - c. Pelatihan bagi pengurus Gapoktan;
  - d. Pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT.
2. Optimalisasi potensi agribisnis didesa miskin yang terjangkau dilaksanakan melalui :
  - a. Identifikasi potensi
  - b. Penentuan usaha agribisnis unggulan
  - c. Penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
3. Fasilitasi modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalandilaksanakan melalui :
  - a. Penyaluran BLM PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan
  - b. Pembinaan teknis usaha agribisnis dan alih teknologi
  - c. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
4. Penguatan kelembagaan Gapoktan dilaksanakan melalui :
  - a. Pendampingan Gapoktan oleh penyuluh pendamping
  - b. Pendampingan oleh PMT di setiap Kabupaten/Kota
  - c. Fasilitasi peningkatan kapasitas Gapoktan menjadi lembaga ekonomi yang mempunyai unit – unit usaha dan dimiliki serta dikelola petani.

## 2.5 Konsep Efektivitas Pelaksanaan Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) mendefinisikan efektif dengan ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya) atau dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan) dan efektivitas diartikan keadaan berpengaruh hal berkesan atau keberhasilan (usaha, tindakan).

Efektivitas merupakan suatu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno *cit* Ade (2003) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

The Liang Gie dalam Ensiklopedi Administrasi (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai : "Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau memang menimbulkan akibat dari yang dikehendakinya itu."

Menurut Drucker *cit* Sukmaniar (2007), efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula.

Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsure atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.

Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan menurut Wahyuningsih *cit* Sukmaniar (2007) yang dapat dilihat dari :

- a. Kemampuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah

tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan.

- b. Pencapaian tujuan, efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan, dalam hal ini dapat dilihat dari hasil secara nyata.

Untuk mengetahui efektivitas suatu program, perlu dilakukan penilaian terhadap manfaat atau daya guna program tersebut. Penilaian terhadap manfaat atau daya guna disebut juga dengan evaluasi (Stufflebeam *cit* Sukmaniar, 2007). Dulu, evaluasi hanya berfokus pada hasil yang dicapai, namun akhir-akhir ini usaha evaluasi ditujukan untuk memperluas atau memperbanyak variabel evaluasi dalam berbagai macam model evaluasi.

Dalam menilai efektivitas program, Tayibnafis *cit* Sukmaniar (2007) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi, yakni sebagai berikut :

1. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*).

Pendekatan ini berasal dari control eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.

2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*).

Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai criteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini member petunjuk kepada pengembang program, emnjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dan hasil yang akan dicapai.

3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*).

Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk mengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini , informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu

evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.

4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*)

Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan kepada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada, keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi di mana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisa data atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting pemakai dan cara pemakaian informasi.

5. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*).

Pendekatan ini menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan kepentingan dengan program. Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuisioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami ihwal berbagai program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif/naturalistic. Pengumpulan data dilakukan observasi dan wawancara, sedangkan instrument tes atau kuesioner dilakukan sebagai data pendukung serta interpretasi data dilakukan secara impresionistik. Evaluator mengobservasi, merekam, menyeleksi, mengecek pengetahuan awal peserta program, dan mencoba membuat model yang mencerminkan pandangan berbagai kelompok. Elemen penting dalam pendekatan ini adalah pengumpulan dan penyintesisan data dengan tidak menghindari pengukuran dan teknis analisis data. Dengan jalan ini, evaluator mencoba

responsive terhadap orang-orang yang berkepentingan pada hasil evaluasi, bukan pada permintaan desain penelitian tau teknik pengukuran.

Kriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanya ditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi juga ditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan , hal tersebut untuk meminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yang berbeda-beda ( Wahyuningsih *cit* Sukmaniar, 2007).

## 2.6 Tinjauan Tentang Kredit Pertanian

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang artinya kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah saling percaya, seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan (Kadarsan, 1995).

Pengertian kredit menurut UU No.10/1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dilaksanakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2002).

Agar kredit sampai kemasyarakat, dibutuhkan adanya lembaga keuangan. Lembaga keungan berfungsi sebagai pelayan kredit dan pelayan keuangan lainnya. Lembaga keuangan merupakan perusahaan – perusahaan atau perorangan yang bertindak sebagai penyambung antara pemilik modal dengan pencari modal. Lembaga ini dapat berupa bank-bank perdangan, perusahaan asuransi, bursa keuangan, lembaga simpan pinjam, pegadaian, bank tabungan dan lembaga pemerintah lainnya yang aktif berpartisipasi dalam pemasaran uang atau modal (Kadarsan, 1995).

Menurut Sinungun dan Humaidi (2006) bahwa lembaga kredit akan berusaha menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Namun dalam pelaksanaannya lembaga perkreditan akan dihadapkan pada tingkat resiko tertentu, karena uang dan jasa telah lepas kepada pihak lain. Oleh karena itu, lembaga perkreditan akan berusaha menyalurkan kredit dengan manajemen dan tingkat bunga tertentu, sehingga akan dapat dicapai sasaran yang dituju secara efektif dan efisien.

Berdasarkan sumber pembiayaan, ada dua jenis kredit mikro dipedesaan yaitu :

1. Pasar kredit formal yang terbagi atas kredit nonprogram atau komersial (seperti BRI Unit Desa, BPR, Koperasi dan Pengadaian) dan kredit program (seperti KUT dan KKP).
2. Pasar kredit informal seperti pelepasan uang, pedagang input/output produksi, dan penggilingan padi.

Kedua kelompok pasar kredit tersebut memiliki pola pelayanan yang khas dalam keragaman kredit yang ditawarkan, target sasaran, aturan pengajuan, pengembalian kredit, dan pelayanan lainnya seperti pengawasan dan pembinaan usaha yang dijalankan nasabah (Supriatna, 2009).

Kredit merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perbankan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi pokok dari kredit dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdangan produk dan jasa yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang yang disimpan dalam bank yang berupa tabungan, deposito dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk meningkatkan produktivitas. Pengusaha akan dapat menikmati kredit-kredit dari bank untuk memperluas usahanya baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru (Kadarsan, 1995).

Dalam pemberian kredit kepada masyarakat lembaga perbankan memiliki lima unsur kredit yaitu :

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jannnga waktu kredit,

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini terjadi antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing,

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko

Makin panjang jangka waktu pengembalian kredit, maka makin besarlah risikonya.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit (Kasmir, 2002).

Tujuan pemberian kredit antara lain :

- a. Mencari keuntungan
- b. Membantu usaha nasabah
- c. Membantu pemerintah antara lain : (1) penerimaan pajak; (2) membuka kesempatan kerja ( Suyatno *et al.* 2003)

Fungsi kredit antara lain :

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Meningkatkan daya guna barang
- d. Meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai stabilitas ekonomi
- f. Meningkatkan kegairahan usaha
- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Meningkatkan hubungan internasional (Suyatno *at al.* 2003).

Dalam prakteknya, masyarakat khususnya petani kecil sulit untuk melakukan akses terhadap lembaga keuangan seperti bank. Komponen-komponen Atau syarat-syarat yang sulit dipenuhi petanilah yang menjadi kendala bagi mereka untuk mengakses lembaga pembiayaan tersebut. Komponen- komponen tersebut antara lain :

- a. Jenis agunan berupa sertifikat tanah atau bangunan. Persyaratan ini sulit dipenuhi oleh petani, terutama petani gurem karena mereka pada umumnya tidak memiliki sertifikat tanah dan bangunan,

- b. Waktu pengembalian kredit secara bulanan, sehingga tidak sesuai dengan karakteristik usaha tanaman semusim yang mempunyai waktu penerimaan musiman,
- c. Prosedur pengajuan kredit yang sangat rumit, formal, membutuhkan waktu lama, dan perlu biaya transportasi (Supriatna, 2009).

Dengan keterbatasan petani untuk melakukan akses terhadap lembaga permodalan maka muncullah pola pelayanan kredit program. Pola pelayanan kredit program merupakan kredit program ditujukan untuk menunjang keberhasilan suatu program, biasanya dibiayai oleh dana pemerintah, dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan biasanya lembaga perkreditan pemerintah. Dengan demikian, ciri umum kredit program pemerintah adalah : bersuku bunga rendah (3-18%/ tahun), berjangka waktu musiman (6-24 bulan), dikembalikan secara musiman, merupakan dana likuiditas dari bank sentral, dan resiko ditanggung oleh pemerintah (Supriatna, 2009).

Pola pelayanan kredit yang ideal untuk petani tanaman pangan dan sayuran adalah : (1) Lembaga pembiayaan agar menghindari persyaratan agunan sertifikat tanah atau bangunan, tetapi apabila terpaksa hendaknya dapat diwakili oleh sertifikat pengurus kelompok tani seperti kredit program, atau bisa juga dibentuk lembaga penjamin kredit; (2) bentuk kredit berupa uang tunai agar petani dapat mengelola sendiri pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha tani; (3) kredit bersifat jangka pendek(musiman) dan pembayaran dilakukan setelah panen; (4) tingkat suku bunga komersial masih bisa diakses oleh petani, asalkan prosedur pengajuan dan perolehan kredit mudah, cepat, dan jumlahnya sesuai dengan pengajuan; (5) besarnya plafon kredit sekitar nilai untuk biaya pengadaan benih, pupuk, dan obat-obatan; (6) pengajuan dan penyaluran kredit melalui kelompok tani dengan harapan disamping dapat menekan biaya juga ada control atau pembinaan pengelolaan pinjaman dan usaha yang dijalankan petani; dan (7) petani menghindari jenis sanksi penyitaan agunan sehingga sebaiknya sanksi berupa penundaan/penjadwalan kembali waktu pembayaran (Supriatna, 2009).

Menurut Ricardson dan Supriatna (2009) bahwa petani sebagai pengguna kredit perlu mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan kredit, yaitu : kredit

digunakan untuk tujuan produktif, membatasi meminjam kredit pada lembaga pembiayaan yang tidak terbiasa, kredit digunakan untuk usaha yang akan memberikan penerimaan paling tinggi dalam batas resiko yang rasional, membuat catatan usaha tani sehingga dapat melakukan analisis yang objektif tentang kebutuhan kredit, memperhatikan kemampuan mengembangkan kredit dari usaha yang dijalankan, memilih sumber kredit yang paling sesuai dengan kebutuhan, dan membangun kejujuran.

## 2.7 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio Keuangan adalah analisis yang digunakan dengan membandingkan/membagi suatu item dalam laporan keuangan dengan item lainnya pada laporan keuangan tersebut dalam satu periode (Darsono, 2009).

Analisis rasio keuangan dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan dan untuk memonitor kekuatan finansial rasio digunakan data yang terdapat dalam neraca dan laporan laba rugi (Astuti, 2009).

Pada dasarnya macam atau jumlah angka-angka dalam rasio banyak sekali karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Berdasarkan sumber datanya maka angka ratio dapat dibedakan antara :

1. Rasio-rasio neraca, yang tergolong dalam kategori ini adalah semua rasio datanya diambil atau bersumber pada neraca.
2. Rasio-rasio laporan laba rugi yaitu angka rasio yang semua datanya diambil dari laporan laba rugi, misalnya gross profit margin, net operating margin, operating ratio, dan lain – lain
3. Rasio-rasio antar laporan yaitu semua angka rasio yang berasal dari neraca dan laporan laba – rugi, misalnya tingkat perputarasn persediaan, tingkat perputaran piutang dan lain lain (Munawir, 2004).

Namun penggolongan angka rasio yang didasarkan sumbernya kurang bermanfaat bagi penganalisa sebab yang penting bagi penganalisa bukan sumber data tapi apa arti atau guna data angka rasio tersebut atau kesimpulan apa yang dapat diperoleh dari angka rasio tersebut.

Tujuan penganalisa pada umumnya untuk mengetahui tingkat rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas pada perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu angka-angka rasio pada dasarnya juga dapat digolongkan antara lain : rasio-rasio

likuiditas, rasio-rasio solvabilitas, rasio-rasio rentabilitas dan rasio-rasio lain yang sesuai dengan kebutuhan penganalisa misalnya rasio-rasio aktivitas (Munawir, 2004).

Analisis rasio keuangan terdiri dari : (1) rasio likuiditas; (2) rasio solvabilitas; (3) rasio profitabilitas atau rentabilitas; dan (4) rasio produktivitas penanaman modal (Kadarsan, 1995).

a. Rasio Likuiditas berguna untuk menunjukkan kesanggupan perusahaan untuk membayar hutang kapan saja, tanpa mengganggu jalannya perusahaan.

Rumus yang digunakan :

Rumus 1 : Rasio Jangka Pendek

$$\text{Rasio Jangka Pendek} = \frac{\text{Jumlah aset Jangka Pendek}}{\text{Jumlah Utang Jangka Pendek}}$$

Semakin besar rasio, maka likuiditas perusahaan semakin baik.

Rumus 2 : Rasio Cepat (Rasio Uji basi)

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Jumlah aset Jangka Pendek} - (\text{persediaan} + \text{inventaris})}{\text{Jumlah Utang Jangka Pendek}}$$

Catatan : bagi perusahaan yang memiliki inventaris dan persediaan yang banyak untuk mengukur likuiditas perusahaan.

b. Rasio Solvabilitas berguna untuk mengetahui sisa aset perusahaan setelah semua aset perusahaan diuangkan dan semua utang dibayar. Jika kekayaan sama atau lebih besar dari jumlah utang maka perusahaan solvable.

Rumus 3 : Rasio Modal dengan Total Aktiva

$$\text{Rasio Modal Dengan Total Aktiva} = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rumus 4 : Rasio Modal Bersih

$$\text{Rasio Modal Bersih} = \frac{\text{Jumlah Semua Harta}}{\text{Jumlah Semua Utang}}$$

Jika rasio solvabilitas  $> 1$ , kalau perusahaan dilikuiditaskan, utang masih bisa dibayar. Ini menunjukkan solvabilitas.

c. Rasio Profitabilitas/ Rentabilitas berguna untuk mengukur efisiensi output terhadap input. Jika perusahaan memiliki rasio yang tinggi menunjukkan bahwa keadaan yang kurang baik.

Rumus 5 : Rasio Operasional

$$\text{Rasio Operasional} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Operasional}}{\text{Jumlah Penerimaan Kotor}}$$

Rumus 6 : Rasio tetap

$$\text{Rasio Tetap} = \frac{\text{Pengeluaran Tetap}}{\text{Jumlah Penerimaan Kotor}}$$

$$\text{Rasio Kotor} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran}}{\text{Jumlah Penerimaan Kotor}}$$

d. Rasio Produktivitas Penanaman Modal berguna untuk mengukur efisiensi penanaman modal.

Rumus 8 : Rasio hasil Inventasi Modal

$$\text{Rasio Hasil Investasi Modal} = \frac{\text{Pendapatan Kotor}}{\text{Investasi Rata-rata Modal}}$$

Ket: Jika hasil investasi modal = 0,5, ini berarti untuk setiap rupiah yang diinvestasikan maka mengakibatkan pendapatan kotor bertambah Rp 0,5.

Rumus 9 : Investasi rata-rata modal

$$\text{Investasi Rata-rata Modal} = \frac{\text{Kakayaan LKM-A awal} + \text{Akhir Tahun}}{2}$$

Rumus 10 : Tingkat hasil investasi Modal

$$\text{Tingkat Hasil Investasi Modal} = \frac{\text{Investasi Modal}}{\text{Rata - rata Investasi Modal}}$$

Rumus 11 : Hasil Bersih Investasi Modal

$$\text{Hasil bersih Investasi Modal} = (\text{Pendapatan Bersih perusahaan} + \text{Bunga yang dibayar}) - (\text{Balas Jasa Manajemen})$$

$$\text{Tingkat Hasil Modal Pribadi} = \frac{\text{Hasil investasi modal pribadi}}{\text{Rata-rata kekayaan pribadi}}$$

## 2.8 Konsep Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Astuti, 2004).

Pengelolaan keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas yaitu : (a) aktivitas penggunaan dana yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva, (b) aktivitas perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber

dana, baik dari sumber dana internal maupun eksternal perusahaan/organisasi, (c) aktivitas pengelolaan aktiva yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva dana harus dikelola seefisien mungkin (Astuti, 2004).

Penyaluran dana merupakan salah satu aktivitas pengelolaan dana yaitu penggunaan dana, dalam istilah perekonomian disebut kredit atau pembiayaan, sedangkan dalam koperasi disebut pinjaman. Pembiayaan merupakan kegiatan LKM yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup LKM., karena dari sinilah sebenarnya LKM akan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dipakai untuk pemenuhan biaya operasional LKM. Oleh karena itu pembiayaan harus dikelola dengan baik dan professional. Dana untuk pembiayaan berasal dari simpanan dan modal yang sebaiknya disalurkan untuk usaha produktif dengan memperhatikan kaidah aman, lancar dan menghasilkan serta prinsip kehati-hatian (Departemen Pertanian, 2009).

Idealnya pengelolaan bantuan modal usaha ini pada intinya harus menciptakan surplus usaha dan dikelola dengan menggunakan prinsip : (1) mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran (*acceptable*); (2) dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); (3) memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); (4) hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri (*suistable*); dan (5) pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*) (Sumodiningrat *et al.* 2003).

Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui bagaimana mengelola segala unsur dan segi keuangan, hal ini wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Wadi (2010) dengan judul “Analisis Fungsi LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar dalam mengelola dana program BLM-PUAP Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota” menjelaskan bahwa pengelolaan dana BLM - PUAP di LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar

telah merujuk kepada aturan-aturan yang ditetapkan Kementerian Pertanian, dan juga menerapkan kebijakan-kebijakan local yaitu : (a) Pembentukan Badan Penyelamatan Keuangan (BPK); (b) adanya studi kelayakan usaha oleh pengurus Gapoktan. Perbedaan antara rencana dan realisasi sebagai akibat dari keterlambatan pencairan dana ke rekening Gapoktan, pertimbangan terhadap usaha anggota, dan pertimbangan terhadap watak atau karakter calon peminjam. Pelaksanaan FGD merumuskan lima poin penting dalam pengelolaan bantuan modal, yaitu : 1) mudah diterima oleh masyarakat (*acceptable*); 2) dipertanggungjawabkan (*accountable*); 3) berorientasi ekonomis (*profitable*); 4) dapat dilestarikan (*sustainable*); 5) mudah digulirkan dalam masyarakat (*replicable*). Kinerja LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP berprediket cukup sehat yang berarti LKM-A sudah cukup baik dalam pengelolaan dana bantuan modal, dengan kelemahan terdapat pada aspek likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri.

Hasil penelitian Purnama Sari (2011) dengan judul “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Terhadap Perkembangan Usaha Agroindustri Anggota(Studi Kasus: KSU LKM-A Prima Tani di Kecamatan Baso Kabupaten Agam)” menjelaskan bahwa LKM-A sebagai sebuah lembaga keuangan mikro memiliki karakteristik yang berbeda dengan LKM-LKM lainnya dan peranan LKM-A Prima Tani yang dapat dilihat dari aspek perkembangan volume produksi dan penjualan, perkembangan daerah pemasaran, perkembangan pendapatan adalah cukup besar. Karena dengan bantuan kredit yang diperoleh oleh anggota dari LKM-A Prima Tani mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha agroindustri anggota tersebut.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Waktu dan Tempat**

Penelitian telah dilaksanakan di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Harapan Bundo yang berlokasi di Jln. Karang Ganting No. 8 RT 01 RW 01 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang. Pemilihan tempat dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa LKM-A Harapan Bundo merupakan lembaga keuangan yang mempunyai catatan sebagai LKM-A terbaik menurut Tim Penilai PUAP Sumbar 2011 (lampiran 4). LKM-A Harapan Bundo juga memiliki pembukuan yang jelas dan teratur sesuai dengan kaidah akuntansi. Selain itu juga dikarenakan kemudahan dalam memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian nantinya.

Penelitian dilaksanakan selama bulan Juni s/d Juli 2014 sesuai dengan surat rekomendasi penelitian yang dikeluarkan oleh Biro Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

### **3.2 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Nazir (2005) metode studi kasus adalah metode suatu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas dimana subjek penelitian bisa berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus yang akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Karakter khas yang dilihat pada LKM-A Harapan Bundo seperti : (1) Profil dari LKM-A Harapan Bundo; (2) Pengelolaan keuangannya yang dilakukan oleh LKM-A Harapan Bundo; dan (3) Permasalahan yang dihadapi oleh LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola keuangan.

### **3.3 Teknik Pengambilan Responden**

Pemilihan responden dalam penelitian ini didasarkan pada keterlibatan dan pengetahuan responden terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LKM-A Harapan Bundo.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini pengelola LKM-A Harapan Bundo, dan Penyelia Mitra Tani (PMT) yang kemudian disebut juga sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

Pengelola LKM-A yang dijadikan informan kunci adalah Manajer LKM-A Harapan Bundo, bagian administrasi dan pembukuan, bagian pembiayaan, penggalangan dana dan kasir/teller. Sedangkan PMT yang dijadikan informan kunci adalah PMT Kota Padang yang wilayah kerjanya termasuk Kecamatan Kuranji, dimana PMT ini merupakan petugas independen yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Gapoktan sehingga dari PMT ini akan diperoleh informasi mengenai perkembangan BLM-PUAP yang merupakan sumber modal pada LKM-A dan potensi LKM-A dalam menjangkau anggota sesuai dengan pengawasan dan pemantauan.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung secara mendalam dengan informan kunci dari LKM-A Harapan Bundo. Data yang diambil yaitu data peminjaman periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013. Sedangkan data sekunder, penulis peroleh dari LKM-A Harapan Bundo, penelitian sebelumnya, jurnal, dan studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

### **3.5 Topik Data**

Sebelum mencapai tujuan penelitian, maka akan digambarkan profil LKM-A Harapan Bundo dan deskripsi pengelolaan keuangan oleh LKM-A harapan Bundo.

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo maka yang akan diamati : (1) jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal; (2) besarnya akumulasi modal oleh LKM-A Harapan Bundo; dan (3) permasalahan yang terkait dalam pengelolaan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo.

### 3.5 Analisis Data

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo maka analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Variabel jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal usaha

Jumlah anggota anggota yang memperoleh bantuan usaha adalah jumlah total anggota pengguna dana berdasarkan realisasi awal pencairan dana BLM – PUAP. LKM-A dikatakan memiliki efektivitas dalam melakukan pengelolaan keuangan apabila jumlah anggota yang mampu dilayani LKM-A Harapan Bundo lebih besar dari 80% (>80%) (Kementrian Pertanian,2010).

Tabel 1. Jumlah Anggota yang Memperoleh Bantuan Modal Tahun 2013

Jumlah Anggota yang Memperoleh Bantuan Modal Tahun 2013	Kategori
> 80%	Banyak
50-80%	Sedang
< 50%	Sedikit

Sumber : Kementrian Pertanian,2010

Jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal dari LKM-A Harapan Bundo ini akan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh LKM-A itu sendiri. Pendapatan yang diperoleh oleh LKM-A ini berasal dari jasa peminjaman, biaya administrasi , dan denda yang dibayarkan oleh anggota yang memperoleh bantuan modal usaha dan registrasi anggota (simpanan pokok).

2. Variabel besarnya akumulasi modal oleh LKM-A Harapan Bundo.

Efektivitas pengelolaan keuangan dilihat dari variabel besarnya akumulasi modal oleh LKM-A Harapan Bundo dapat dinilai melalui analisis finansial. Langkah – langkah sebagai berikut :

1 Lakukan Analisis Rasio Keuangan

**a. Rasio Likuiditas**

Rumus 1 : Rasio Jangka Pendek

$$\text{Rasio Jangka Pendek} = \frac{\text{Jumlah aset Jangka Pendek}}{\text{Jumlah Utang Jangka Pendek}}$$

Semakin besar rasio, maka likuiditas perusahaan semakin baik. Apabila rasio 1:1 atau 100% ini berarti aset jangka pendek dapat menutupi utang jangka pendek, rasio yang aman adalah r di atas 1 atau 100% artinya jumlah aset jangka pendek harus jauh di atas hutang (Kadarsan, 1995)

Rumus 2 : Rasio Cepat (Rasio Uji basi)

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Jumlah Aset Jangka Pendek} - (\text{persediaan} + \text{inventaris})}{\text{Jumlah Utang Jangka Pendek}}$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan aset jangka pendek yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar, semakin besar rasio ini semakin baik. Untuk rasio likuiditas standar yang ditetapkan adalah 100% atau 1:1 (Kadarsan, 1995).

#### **b. Rasio Solvabilitas**

Rumus 3 : Rasio Modal dengan Total Aktiva

$$\text{Rasio Modal dengan total aktiva} = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rumus 4 : Rasio Modal Bersih

$$\text{Rasio Modal Bersih} = \frac{\text{Jumlah Semua Harta}}{\text{Jumlah Semua Utang}}$$

Jika rasio solvabilitas > 1, kalau perusahaan dilikuiditaskan, utang masih bisa dibayar. Ini menunjukkan solvabilitas.

Untuk rasio solvabilitas standar yang ditetapkan adalah 100% (Kadarsan, 1995).

#### **c. Rasio Profitabilitas/ Rentabilitas**

Rumus 5 : Rasio Operasional

$$\text{Rasio Operasional} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Operasional}}{\text{Jumlah Penerimaan Kotor}}$$

Rumus 6 : Rasio tetap

$$\text{Rasio Tetap} = \frac{\text{Pengeluaran Tetap}}{\text{Jumlah Penerimaan Kotor}}$$

$$\text{Rasio Kotor} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran}}{\text{Jumlah Penerimaan Kotor}}$$

Standar yang ditetapkan adalah 100 % atau 1 : 1. Jika rasio < 1 maka perusahaan efisien dan untung (Kadarsan, 1995).

#### d. Rasio Produktivitas Penanaman Modal

Rumus 8 : Rasio hasil Inventasi Modal

$$\text{Rasio Hasil Investasi Modal} = \frac{\text{Pendapatan Kotor}}{\text{Investasi Rata-rata Modal}}$$

Rumus 9 : Investasi rata-rata modal

$$\text{Investasi Rata-rata Modal} = \frac{\text{Kakayaan LKM-A awal} + \text{Akhir Tahun}}{2}$$

Standar yang ditetapkan adalah 1. Menurut Harahap (2003) semakin besar nilai rasio maka semakin bagus atau efisien, keadaan yang aman adalah jika rasio hasil investasi modal  $> 1$ .

Rumus 10 : Tingkat hasil investasi Modal

$$\text{Tingkat Hasil Investasi Modal} = \frac{\text{Hasil Bersih Investasi Modal}}{\text{Rata - rata Investasi Modal}}$$

Rumus 11 : Hasil Bersih Investasi Modal

$$\text{Hasil Bersih Investasi Modal} = (\text{Pendapatan Bersih perusahaan} + \text{Bunga yang dibayar}) - (\text{Balas Jasa Manajemen})$$

(Kadarsan, 1995).

Standar normal dari rasio tingkat hasil investasi bersih adalah 100%, kerana semakin besar nilai standar maka semakin kuatlah posisi modal dalam suatu perusahaan (Harahap, 2003). Namun kerana format LKM-A adalah unit usaha yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat yang tidak semata – mata mencari keuntungan maka standar yang ditetapkan adalah 20 %. Hal ini dikarenakan dengan standar 20 % maka modal yang ditanam dalam LKMA sudah produktif (Wijono, 2005).

#### 2 Lakukan penilaian atas masing – masing rasio

Untuk memberikan penilaian atas masing – masing rasio yang mampu dipenuhi LKM-A akan dipergunakan tabel penilaian. Pemberian nilai untuk masing – masing rasio tidak sama. Walaupun rasio keuangan memiliki peranan penting dan saling terkait satu sama lain namun nilai standar untuk masing – masing rasio tidak sama oleh sebab itulah

pemberian nilai berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

a. Rasio Likuiditas

Untuk melihat skala nilai rasio likuiditas dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Skala Nilai yang Digunakan untuk Menilai Rasio Likuiditas.

Rasio	Nilai
$r >$ standar yang ditetapkan	3
$r =$ standar yang ditetapkan	2
$r <$ standar yang ditetapkan	1

b. Rasio Solvabilitas

Untuk melihat skala nilai rasio solvabilitas dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Skala Nilai yang Digunakan untuk Menilai Rasio Solvabilitas.

Rasio	Nilai
$r >$ standar yang ditetapkan	3
$r =$ standar yang ditetapkan	2
$r <$ standar yang ditetapkan	1

c. Rasio Profitabilitas

Untuk melihat skala nilai rasio profitabilitas dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Skala Nilai yang Digunakan untuk Menilai Rasio profitabilitas

Rasio	Nilai
$r <$ standar yang ditetapkan	3
$r =$ standar yang ditetapkan	2
$r >$ standar yang ditetapkan	1

d. Rasio Produktivitas Penanaman Modal

Untuk melihat skala nilai rasio solvabilitas dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5. Skala Nilai yang Digunakan untuk Menilai Rasio Produktivitas penanaman modal.

Rasio	Nilai
$r >$ standar yang ditetapkan	3
$r =$ standar yang ditetapkan	2
$r <$ standar yang ditetapkan	1

### 3. Pengkategorian tingkat kesehatan keuangan LKM-A

Berdasarkan perolehan nilai, selanjutnya ditentukan jumlah interval atau selang kelas untuk menentukan efektivitas rasio keuangan.

$$\text{Interval/ selang} = \frac{\text{nilai max} - \text{nilai minimum}}{\text{banyak kelas/kategori}} \quad (\text{Nazir,2005}).$$

Dimana nilai rasio keuangan dibagi menjadi tiga kategori yaitu sehat, cukup sehat, dan tidak sehat. Nilai yang diperoleh adalah 9 – 27. Nilai 9 didapat dari hasil perkalian nilai terendah yakni 1 dengan jumlah rasio keuangan yang digunakan 9 atau ( $1 \times 9 = 9$ ). Sedangkan nilai 27 didapat dari hasil perkalian dari nilai tertinggi yakni 3 dengan jumlah rasio keuangan yang digunakan 9 atau ( $3 \times 9 = 27$ ) (Iskandar, 2009).

Penentuan selang untuk setiap tingkat penilaian dilakukan dengan cara pengurangan antara nilai skor tertinggi dengan nilai skor terendah yang kemudian hasilnya dibagi dengan banyaknya kategori penilaian atau dapat ditulis sebagai berikut :

$$\frac{27 - 9}{3} = 6$$

Nilai 6 merupakan selang untuk setiap tingkatan penilaian. Dari selang tersebut dapat ditentukan rentang nilai setiap kategori penilaian. Untuk lebih jelasnya rentang skala untuk masing-masing kategori penilaian dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Indeks Keuangan LKM-A Harapan Bundo Selama Satu Tahun (Januari s/d Desember 2013).

Kategori	Rentang
Sehat	22 – 27
Cukup Sehat	16 – 21
Kurang Sehat	9 – 15

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa jika total nilai berada pada rentang nilai 13 = 16, maka rasio keuangan LKM-A dikatakan sehat. Jika total nilai berada pada rentang nilai 9 – 12, maka rasio keuangan LKM-A dikatakan cukup sehat, dan jika total nilai berada pada rentang 5 – 8, maka rasio keuangan LKM-A dikatakan kurang sehat.

4. Masukkan kedalam matrik efektivitas pengelolaan keuangan LKM-A

Selanjutnya tarik kesimpulan dari efektivitas pengelolaan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo maka akan dibuat matriks efektivitas pengelolaan keuangan oleh LKM-A seperti pada tabel.

Tabel 7. Matrik Efektivitas Pengelolaan Keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo

Persentase Jumlah Anggota memperoleh Bantuan Modal	Akumulasi Modal oleh LKM-A Harapan Bundo		
	Kurang Sehat (9 – 15)	Cukup Sehat (16 – 21)	Sehat (22 – 27)
Sedikit (< 50%)	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
Sedang (50 – 80 %)	Tidak Efektif	Cukup Efektif	Cukup Efektif
Banyak (> 80 %)	Tidak Efektif	Cukup Efektif	Efektif

Untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh LKM-A dalam pengelolaan keuangan maka analisis data yang dilakukan adalah secara deskriptif kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan cara membuat deskripsi, gambaran-gambaran secara sistematis dan aktual mengenai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan BLM PUAP. Dengan adanya analisis efektivitas dan informasi yang diterima oleh pihak LKM-A serta melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh LKM-A sehingga dapat diketahui upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

### 3.7 Defenisi Operasional

1. Efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan, dan merujuk pada kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan keuangan adalah pengelolaan dana yang diberikan kepada kelompok untuk mengatasi keterbatasan modal meliputi kegiatan perencanaan, pengendalian, pencairan dan penyimpanan dana yang diberikan ke LKM-A.
3. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan ( sosial, ekonomi, sumber daya), dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha
5. Nasabah adalah anggota LKM-A yang melakukan pinjaman.
6. Pemanfaatan dana adalah bentuk penggunaan dana yang disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan oleh kelompok dan dengan adanya persetujuan dari dinas terkait.
7. Penyelia Mitra Tani dalah individu yang memiliki keahlian dibidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan pengawasan dan penilain kepada penyuluh dan pengelola Gapoktan dalam pengembangan PUAP.
8. Rencana Usaha Kelompok (RUK) adalah rencana usaha yang disusun oleh kelompok yang bertujuan untuk pengembangan usaha anggota dalam kelompok tani.
9. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan dan potensi desa.
10. Modal adalah kekayaan bersih pemilik dalam bisnis , dalam konteks manajemen modal diartikan sebagai keseluruhan aktiva sehingga mencakup ekuitas dan utang bisnis.
11. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan LKM-A dalam membayar hutang kapan saja, tanpa mengganggu jalannya LKM-A

12. Rasio cepat adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Atau kemampuan LKM-A tepat pada saatnya dalam membayar hutang.
13. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui sisa aset LKM-A setelah semua utang dibayarkan.
14. Rasio profabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi input terhadap output.
15. Rasio produktivitas penanaman modal berguna untuk mengukur efisiensi penanaman modal.
16. Kesehatan LKM-A adalah kondisi atau keadaan LKM-A yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dan kurang sehat.
17. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang, yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan LKM-A dalam meningkatkan kegiatan usaha.
18. Modal sendiri LKM-A adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambahkan dengan maksimal 50% modal penyertaan.

## BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Wilayah Kerja LKM-A Harapan Bundo

Wilayah kerja LKM-A Harapan Bundo adalah pada 1 (satu) kelurahan yakni di Kelurahan Lubuk Lintah. Kelurahan Lubuk Lintah di Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat memiliki luas daerah 403 Ha. Kelurahan ini berjarak 2 Km dari Ibukota Kecamatan, 6 Km dari pusat Kota Padang, dan 4 Km dari Ibukota Provinsi. Daerah ini memiliki batas – batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Batang Kuranji/Kelurahan kalumbuk, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Anduring, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ampang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasar Ambacang (BPS Kota Padang, 2010).

Topografi kelurahan Lubuk Lintah berada pada ketinggian 17 m – 21 m dari permukaan laut dengan topografi datar. Jenis tanah yang dominan subur yang merupakan lahan sawah dan lahan kering yang telah digunakan untuk pengembangan komoditas padi sawah, sayur – sayuran. Status lahan pada umumnya milik sendiri dan digarap sendiri dan sebagian adalah tanah adat. Mata pencaharian penduduknya terdiri dari pertanian, dagang, Industri rumah tangga, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (BPS Kota Padang, 2010)

Jumlah Penduduk Kelurahan Lubuk Lintah sebanyak 8.951 jiwa atau sekitar 11.77 % dari jumlah keseluruhan penduduk kecamatan Kuranji (105.370 jiwa), dengan kepadatan penduduk 2.096 per Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kelurahan Lubuk Lintah ini terdiri dari 4.363 jiwa laki – laki dan 4.588 jiwa perempuan (BPS Kota Padang, 2010).

Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Lubuk Lintah ini dapat dikatakan memadai, seperti adanya jalan raya kelurahan, jalan raya kecamatan, dan jalan raya kota. Kelancaran transportasi didukung oleh sarana angkutan darat seperti mobil angkutan ke kelurahan, ke pusat kecamatan, ke pusat Kota Padang serta ojek.

Sarana dan prasarana lain berupa lembaga-lembaga keuangan yang ditujukan untuk membantu masyarakat kecamatan Kuranji dalam hal pembiayaan dan menyimpan dana mereka. Namun sejauh ini, lembaga – lembaga keuangan

yang ada tersebut belum mendapatkan sambutan baik bagi masyarakat di daerah tersebut, hal ini disebabkan oleh prosedur peminjaman dan menabung yang dianggap masyarakat masih berat. Sebagai contoh adanya persyaratan agunan pada BRI dan BPR. Kemudian untuk meminjam modal di KUD atau koperasi lainnya, membutuhkan waktu yang lama, hal ini disebabkan karena kebanyakan petani di Kelurahan Lubuk Lintah sudah banyak menjadi anggota koperasi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan anggotanya tidak optimal. Potensi yang ada di Kel. Lubuk Lintah, baik dari potensi penduduk dan sarana prasarana akan mendukung pengembangan LKM-A Harapan Bundo dalam usaha pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat tani yang berada di Kel. Lubuk Lintah.

## **4.2. Profil LKM-A Harapan Bundo**

### **4.2.1. Sejarah dan Tujuan pendirian LKM-A Harapan Bundo**

Dasar terbentuknya Gapoktan Harapan Bundo ialah atas kesepakatan masyarakat Kelurahan Lubuk Lintah yang tergabung dalam beberapa kelompok tani yang ada pada daerah tersebut untuk mengatasi permasalahan permodalan. Dasar pembentukan ini merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang kelembagaan tani. Pembentukan Gapoktan ini juga didasari oleh kebijakan pemerintah agar penyaluran dana program BLM-PUAP tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu peningkatan usaha produktif anggota.

Gapoktan Harapan Bundo didirikan pada tanggal 7 Januari 2008 setelah diadakannya musyawarah antara kelompok-kelompok yang ada di Kelurahan Lubuk Lintah dan kemudian ditetapkan dengan surat akta Notaris (Yenita Asmawel). Akta lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan Bundo No 19 tanggal 16 Juli 2009, akta Notaris ini sebagai legalitas operasional Gapoktan yang berdiri atas kesepakatan mereka dan merupakan cerminan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan usaha dan kesejahteraan anggotanya. Dasar hukum dalam pelaksanaan LKM-A adalah berdasarkan UU No.25/1992. Untuk legalitas operasional LKM-A maka LKM-A Harapan Bundo memerlukan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang difasilitasi Dinas Pertanian.

Sebagai wujud nyata untuk mencapai tujuan tersebut, maka Gapoktan Harapan Bundo juga membentuk dan mengaktifkan beberapa unit usaha otonomnya yaitu unit usaha produksi, unit sarana dan prasarana, unit pengolahan hasil, unit pemasaran dan unit pembiayaan yang dinamakan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang di beri nama LKM-A Harapan Bundo (Lampiran 5).

#### **4.2.2. Organisasi**

Kementrian Pertanian Indonesia (2010) menjelaskan bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan organisasi petani dipedesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha anggotanya. Untuk membangun Gapoktan yang ideal sesuai dengan tuntutan organisasi masa depan, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan Gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan anggota dalam pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan anggota, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta anggota dan masyarakat pedesaan, dalam rangka mengukur kapasitas dan aspek tata kelola organisasi menggunakan ukuran sebagai berikut :

1. Aturan yang dimiliki. Aturan yang harus dimiliki oleh Gapoktan adalah Anggaran Dasar (AD) yang merupakan aturan dasar dari sebuah lembaga Gapoktan yang disusun oleh anggota pemilik Gapoktan dalam menentukan arah dan kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan penjabaran dari anggaran dasar yang memuat aspek: hak dan kewajiban anggota, pengurus, dan pengelola; kegiatan usaha, modal dan simpanan anggota, pembinaan dan pengawasan, dan lain-lain.
2. Pengelola LKM-A. Pengelola dan pengurus dalam suatu organisasi lembaga keuangan yang sehat sebaiknya terpisah. Secara umum pengurus mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan organisasi, pengawasan, melaporkan perkembangan dan kemajuan organisasi kepada

- anggota atau pihak luar. Pengelola merupakan pelaksana operasional bisnis keuangan organisasi LKM-A sesuai AD/ART.
3. Rencana kerja. Rencana kerja organisasi merupakan rencana bisnis yang telah diputuskan melalui rapat anggota . pembentukan rencana kerja yang ideal pada umumnya dilaksanakan secara partisipatif.
  4. Rapat anggota secara berkala. Pertemuan atau rapat anggota yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwalkan merupakan hal dasar yang dapat mengukur kedinamisan pengelolaan LKM-A sebagai organisasi ekonomi.
  5. Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan dan jadwal pelaksanaan menjadi ukuran keberhasilan pengelola dalam mengorganisasikan LKM-A sebagai lembaga ekonomi.
  6. Badan Hukum. Badan hukum merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh LKM-A sebagai lembaga keuangan mikro yang mengelola dana anggota dan masyarakat. LKM-A disarankan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 dan dalam operasionalnya menggunakan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, Gapoktan juga dapat menggunakan badan hukum melalui peraturan daerah (perda) walaupun secara teknis belum/tidak dapat dipakai sebagai dasar program *linkage* dengan perbankan/lembaga keuangan (Kementrian Pertanian, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada LKM-A Harapan Bundo, maka struktur kepengurusan LKM-A Harapan Bundo memiliki keterkaitan dengan struktur kepengurusan Gapoktan Harapan Bundo. Namun, keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Penyusutan struktur organisasi LKM-A Harapan Bundo diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2013, struktur organisasi LKM-A terdiri dari badan pembina LKM-A, Pengurus Gapoktan, Pengelola LKM-A serta anggota. Badan Pembina yaitu UPTD Kecamatan Kuranji, Penyuluh Pendamping Kelurahan Lubuk Lintah. Pengurus Gapoktan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Pengelola LKM-A terdiri

dari Manajer, Bagian Pembiayaan, Bagian Administrasi dan Pembukuan, Bagian Penggalangan Dana, dan Kasir/Teller. Adapun bentuk struktur organisasi organisasi LKM-A Harapan Bundo dapat dilihat pada lampiran 6.

Pengurus Gapoktan Harapan Bundo ini dalam strukturnya tidak dapat dipisahkan dengan struktur LKM-A Harapan Bundo. Dimana dalam kegiatannya LKM-A Harapan Bundo ini selalu dimonitoring oleh pengurus Gapoktan Harapan Bundo. Dan dalam proses peminjaman, pengurus Gapoktan juga memiliki peranan untuk menentukan apakah anggota yang ingin meminjam tersebut layak untuk memperoleh pinjaman dari LKM-A Harapan Bundo.

Peranan Pengurus Gapoktan tersebut dapat terlihat pada saat rapat penentuan layak atau tidaknya seorang peminjam memperoleh pinjaman. Dimana sebelum adanya keterangan dari pengurus Gapoktan maka keputusan untuk anggota yang mengajukan pinjaman tidak dapat dikeluarkan.

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) LKM-A Harapan Bundo, Pengelola LKM-A memiliki tugas/fungsi sebagai berikut : (1) Manajer umum menjalankan tugas-tugas memimpin Rapat Anggota Dan Rapat Pengurus, membina kepemimpinan antara pengelola, ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan LKM-A, menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh ketentuan AD/ART LKM-A, khususnya mengenai pencapaian tujuan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip utama LKMA; (2) bidang pembiayaan menjalankan tugas untuk melakukan survey atau penelitian terhadap anggota yang akan memperoleh pinjaman tentang keberadaan anggota; (3) penggalangan dana bertugas untuk mencari dana yang berdasarkan dari luar dan merangkul para donatur untuk kepentingan perkembangan LKM-A; (4) administrasi dan pembukuan bertugas membuat serta memelihara berita acara asli dan lengkap dari rapat-rapat anggota dan rapat-rapat pengurus; (5) kasir bertugas memberikan catatan-catatan keuangan LKM-A, memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi dan mengatur efektifnya pengamanan kekayaan.

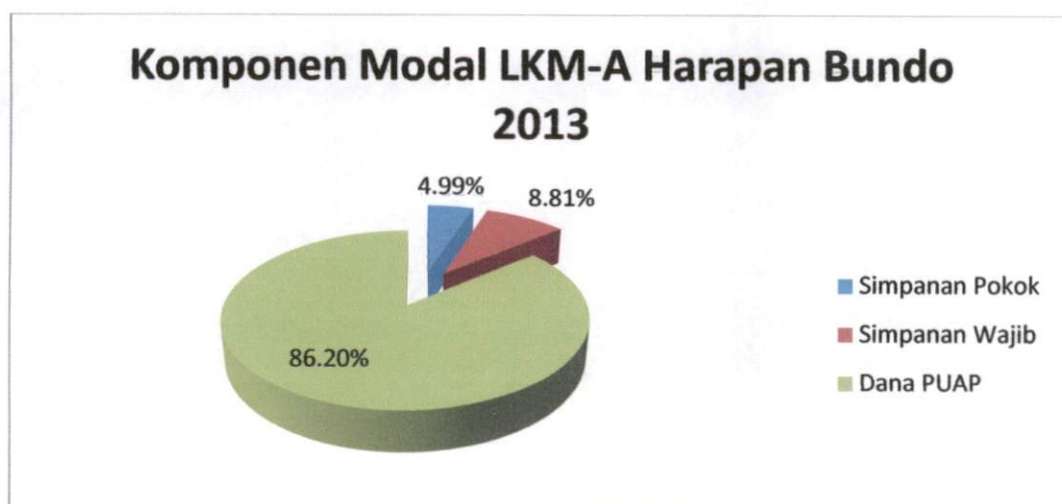
Berdasarkan struktur organisasi pada lampiran 6, terlihat bahwa ada dua jabatan yang ditempati oleh satu orang yaitu posisi bagian administrasi dan pembukuan dan posisi kasir yang mana ditempati oleh Dheo Kharisma. Dari hasil

wawancara yang telah dilakukan, hal ini disebabkan karena keluarnya pengelola dibidang administrasi dan pembukuan yang harus memenuhi panggilan pekerjaan lain keluar kota Padang, keluarnya pada tahun yang sedang berjalan sehingga untuk penunjukkan pengisian jabatan harus melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun berikutnya. Untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak terjadi kekosongan jabatan maka manajer umum bersama pengurus menunjuk Dheo Kharisma untuk mengisi sementara jabatan tersebut agar tidak berakibat buruk terhadap pelaksanaan kegiatan usaha-usaha di LKM-A Harapan Bundo. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) berikutnya LKM-A dan Gapoktan Harapan Bundo akan menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat pengelola LKM-A agar tidak terjadi lagi kekosongan fungsi pengelolaan seperti periode tahun 2013.

#### 4.2.3. Permodalan

Anggaran Rumah Tangga (ART) LKM-A Harapan Bundo menjelaskan bahwa modal LKM-A terdiri dari modal sendiri/ekuitas, modal luar/pinjaman, dan modal penyertaan. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Modal penyertaan berasal dari modal penyertaan non anggota (dana PUAP).

Berdasarkan Neraca LKM-A Harapan Bundo periode 31 Desember 2013 (lampiran 7) dan keadaan modal LKM-A Harapan Bundo (lampiran 9) dapat dilihat bahwa modal yang dimiliki oleh LKM-A Harapan Bundo sebagai mana dalam Gambar 2 sebagai berikut :

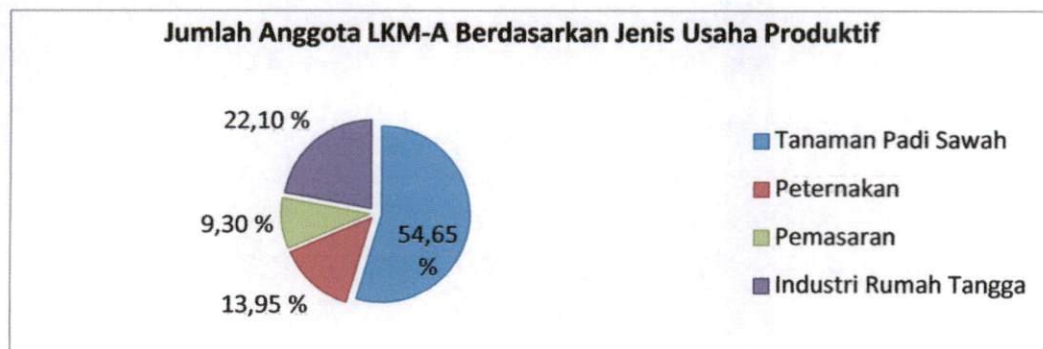


Gambar 2. Komponen Modal LKM-A Harapan Bundo

Pada gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa sumber dan komponen permodalan LKM-A Harapan Bundo sebagian besar merupakan sumber dari dana BLM-PUAP, yang menyokong sebagian besar dari kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan LKM-A Harapan Bundo. Simpanan pokok anggota sebesar Rp 50.000,- dibayar pada saat menjadi anggota LKM-A Harapan Bundo, jumlah simpanan pokok sampai Desember 2013 adalah Rp. 5.800.000,- atau sebanyak 4,99 % dari komponen modal LKMA. Simpanan wajib dibayar sebesar Rp 5.000,- per bulan, jumlah simpanan wajib sampai Desember 2013 adalah Rp. 10.221.000,- atau sebanyak 8,81 % dari komponen modal LKM-A. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak mempengaruhi besarnya pinjaman yang diberikan oleh LKM-A Harapan Bundo . Modal penyertaan yaitu dana BLM-PUAP adalah sebesar Rp. 100.000.000, atau sebanyak 86,20 % dari komponen modal LKM-A Harapan Bundo, ini karena LKM-A Harapan Bundo masih pada tahap pemupukan modal untuk pembiayaan anggota LKM-A Harapan Bundo.

#### 4.2.4. Keanggotaan

Anggota LKM-A Harapan Bundo merupakan anggota Gapoktan Harapan Bundo yang bergabung pada LKM-A. Berdasarkan data yang penulis peroleh, jumlah anggota yang telah memanfaatkan dana BLM-PUAP sampai Desember 2013 adalah berjumlah 86 orang, berasal dari berbagai jenis usaha produktif (Lampiran 10). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagaimana pada Gambar 3 sebagai berikut :



Gambar 3. Persentase Jumlah Anggota berdasarkan Jenis Usaha Produktif (2013)

Dari gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa jenis usaha produktif yang paling banyak anggota peminjamnya adalah bidang usaha pertanian padi sawah sebesar 54,65 % dari jumlah total anggota yang pernah memperoleh pinjaman dana. Secara umum memang usaha ini menjadi prioritas bagi LKM-A Harapan Bundo dalam memberikan bantuan dana karena petani anggota yang banyak mengalami masalah dengan permodalan usaha pertanian padi sawah. Pada proses pengembalian dana usaha tanaman padi sawah ini tidak mengalami kesulitan karena pada akad peminjaman telah disepakati kemampuan petanianggota dalam pengembalian berdasarkan musim panen padi sawah yang akan dibiayai.

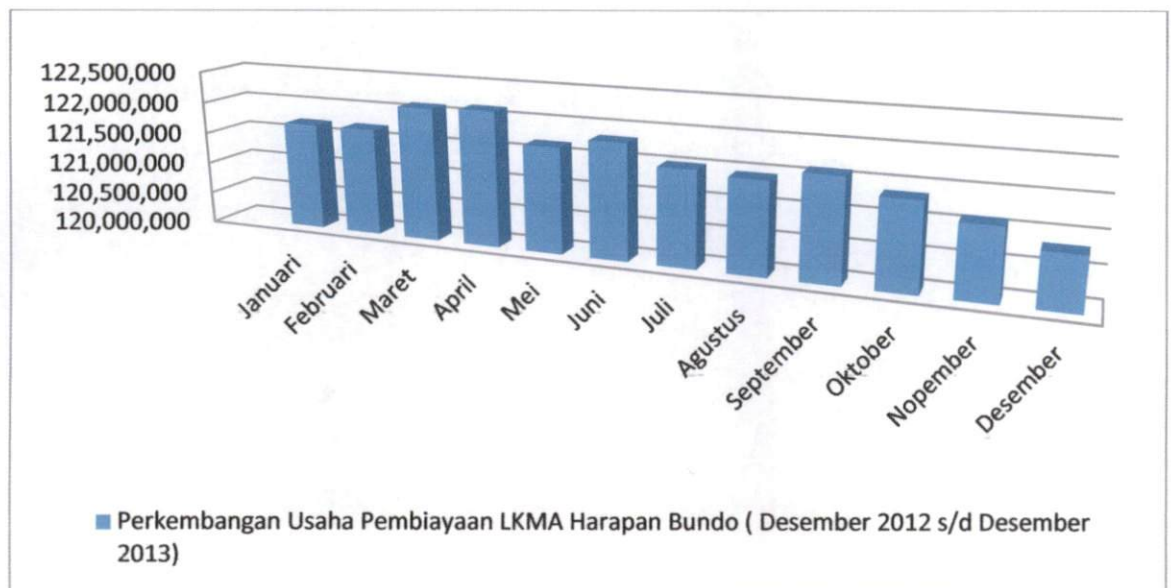
Jenis Usaha Pemasaran sebanyak 9,30 % dari jumlah total anggota yang sedang dibiayai adalah jenis usaha yang paling sedikit memanfaatkan pelayanan dan pembiayaan dari LKM-A Harapan Bundo, karena sebagian anggota LKM-A yang juga memasarkan hasil taninya juga sudah mengolah terlebih dahulu, dan meminjam ke LKM-A atas nama usaha industri rumah tangga. Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan PUAP, keanggotaan LKM-A terbagi atas tiga pengelompokkan, yaitu : 1) anggota biasa, anggota ini adalah anggota LKM-A yang berasal dari anggota Gapoktan penerima dana PUAP, perorangan, dewasa, dan memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur oleh LKM-A, 2) anggota luar biasa, yaitu perorangan yang memanfaatkan layanan tabungan LKM-A dan hanya memiliki hak bicara saja, dan 3) calon anggota, yaitu perorangan dewasa yang telah mengajukan permohonan menjadi anggota LKM-A serta telah memenuhi kewajiban yang telah diisyaratkan, memiliki hak bicara dan hak suara serta berhak atas pelayanan pinjaman LKM-A.

Agar kegiatan pelayanan keuangan dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar dan mencapai skala ekonomi yang layak, maka potensi calon anggota harus banyak terdiri dari pelaku utama dan pelaku usaha yang memerlukan layanan keuangan, keanggotaan dinyatakan sah apabila telah mengajukan permohonan tertulis, mendapat persetujuan dalam rapat pengurus, telah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib serta memperoleh buku anggota. Setiap anggota punya hak dan kewajiban yang sama. Setiap anggota wajib mentaati aturan yang telah disepakati dan berdisiplin. Keanggotaan tidak

dapat dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuan pengurus (BPTP Sumatera Barat, 2009).

#### 4.2.5. Perkembangan Pembiayaan LKM-A

Berdasarkan wawancara dengan Manajer LKM-A Harapan Bundo, dalam pengembangan usahanya, LKM-A Harapan Bundo juga menciptakan berbagai produk simpanan/tabungan. Produk ini bertujuan untuk menggalang dan swadaya disamping dana PUAP. Produk-produk simpanan tersebut adalah : 1) Simpanan Masyarakat (Simas), 2) Simpanan Idul Fitri (Sidufi), 3) Simpanan Qurban (Siaqur), dan 5) Simpanan Pendidikan (Simpen). Menurut manajer LKM-A Harapan Bundo, pelaksanaan usaha ini dilakukan dengan cara jemput bola agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Namun karena keterbatasan tenaga dan kurangnya sosialisasi, produk-produk simpanan ini belum terlaksana sesuai harapan. Sebaiknya, untuk pelaksanaan usaha ini ada tenaga tambahan yang melakukan sosialisasi dan mengumpulkan simpanan tersebut. Sehingga saat ini pengelola lebih fokus untuk melakukan kegiatan pemupukan dana melalui kegiatan menjalin kemitraan dengan pihak lain dan penambahan modal dari pemerintah. Perkembangan Usaha Pembiayaan dengan menggunakan dana PUAP ini dapat dilihat pada lampiran 11 dan Gambar 4 berikut ini :



Gambar 4. Perkembangan Usaha Pembiayaan (Dana PUAP) LKM-A Harapan Bundo ( Januari s/d Desember 2013).

Unit usaha inti dari LKM-A Harapan Bundo ini adalah bidang pembiayaan. Perkembangan usaha ini tidak terlepas dari kontribusi dana PUAP yang dikucurkan pemerintah ke Gapoktan Harapan Bundo. Disamping dana tersebut, pengelola juga berusaha untuk melakukan pemupukan modal dari sumber-sumber lain seperti penanaman modal pihak swasta. Hal ini lah yang menjadikan LKM-A Harapan Bundo mampu memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggotanya.

### 4.3. Deskripsi Pengelolaan Dana Program BLM-PUAP di LKM-A Harapan Bundo

#### 4.3.1. Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Dana LKM-A

Proses pencairan dana BLM-PUAP di Gapoktan Harapan Bundo hingga dikelola oleh LKM-A, dilakukan dengan mengacu kepada tahap yang telah ditetapkan oleh petunjuk dan pedoman pencairan dana BLM PUAP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Proses-proses tersebut meliputi pembuatan Rencana Usaha Anggota (RUA) yang dibuat anggota ke tiga kelompok tani, pembuatan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang dibuat berdasarkan RUA oleh pengurus Poktan, dan pembuatan Rencana Usaha Bersama (RUB) berdasarkan RUK yang dibuat oleh pengurus Gapoktan. Proses pembuatan rencana-rencana tersebut sebagai mana terlihat dalam Tabel 5 berikut ini :

Tabel 8. Proses Pembuatan Rencana Usaha Gapoktan Harapan Bundo

No	Jenis Rencana	Rincian Isi Rencana	Pelaksanaan/Pembuatan
1	2	3	4
1	Rencana Usaha Anggota (RUA)	Dokumen rencana usaha per anggota meliputi : a. Data anggota b. Jenis usaha c. Volume usaha d. Kebutuhan biaya e. Jadwal pemanfaatan	RUA ini dibuat oleh masing-masing anggota Poktan kemudian diketahui dan ditanda tangani oleh ketua Poktan yang bersangkutan.
2	Rencana Usaha Kelompok (RUK)	Rekapitulasi RUA meliputi : a. Data base Poktan b. Nama, tanda tangan dan jenis usaha anggota c. Volume dan nilai usaha d. Jadwal pemanfaatan	RUK ini dibuat oleh ketua Poktan yang tergabung dalam Gapoktan Harapan Bundo dan diperiksa dan disahkan oleh ketua Gapoktan

3	Rencana Usaha Bersama (RUB)	Rekapitulasi RUK dengan batasan dana PUAP, meliputi : a. Data base Gapoktan b. Pengurus Gapoktan c. Nomor, Rekening Gapoktan d. Alamat dan nama Bank e. Rincian jenis usaha produktif f. Satuan volume g. Nilai/total dana PUAP	RUB dibuat dan ditanda - tangani oleh ketua Gapoktan Harapan Bundo dan selanjutnya disetujui oleh ketua tim teknis PUAP Kota Padang.
---	-----------------------------	--	--

Sumber : Profil Gapoktan Harapan Bundo,2014

Sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun oleh Gapoktan Harapan Bundo sebelum pencairan dana PUAP ke rekening Gapoktan (lampiran 12), dapat dilihat bahwa dana program BLM PUAP direncanakan penggunaannya untuk lima jenis usaha produktif. Penyusunan RUB ini berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA) Dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) (lampiran 13,14, dan 15)

Rencana pencairan dan penggunaan dana BLM-PUAP dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini :

Tabel 9. Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Dana BLM-PUAP

No	Uraian	Rencana	Realisi
1	Jadwal Pencairan	September – November 2009	Februari – Desember 2010
2	Penerima	32 orang	32 orang
3	Jenis Usaha (penggunaan)	5 Jenis Usaha : 1. Usaha tani tanaman pangan 2. Usaha tani hortikultura 3. Peternakan 4. Industri RT 5. Pemasaran Hasil Pertanian	5 Jenis Usaha : 1.Usaha tani tanaman pangan 2. Usaha tani hortikultura 3. Peternakan 4. Industri RT 5. Pemasaran Hasil Pertanian
4	Jumlah Pencairan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-

Pencairan dana BLM-PUAP untuk anggota Gapoktan Harapan di bulan September 2009 sampai dengan bulan November 2009. Namun karena pencairan dana dari Departemen Pertanian baru masuk ke rekening Gapoktan pada bulan

Februari 2010, maka realisasi baru mulai dilaksanakan pada bulan tersebut. Terkait dengan rencana dan realisasi jenis usaha, rencana penggunaan dana yang telah disusun oleh Gapoktan Harapan Bundoesuai dengan realisasi penggunaan dana yang telah ditetapkan.

Jenis usaha anggota yang saat ini menjadi perhatian bagi pengelola LKM-A Harapan Bundo adalah bidang tanaman pangan dan pemasaran hasil pertanian. Karena kedua jenis usaha tersebut memberikan kontribusi yang baik terhadap kelancaran usaha pembiayaan LKM-A Harapan Bundo.

Penggunaan dana yang dimiliki oleh LKM-A bertujuan untuk mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh anggota agar pendapatan mereka meningkat dan secara bertahap keluar dari garis kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penggunaan dana diprioritaskan pada usaha agribisnis yang mampu : 1) memberikan keuntungan relatif baik dan perolehan penerimaan dalam jangka pendek, dan 2) usaha yang memberikan nilai tambah. (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Kementerian pertanian (2010), dalam modul pengembangan LKM-A menggambarkan prosedur permohonan pencairan yang terperinci sebaiknya dilakukan oleh pengelola LKM-A Harapan Bundo. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh LKM-A Harapan Bundo, proses permohonan dan pencairan pinjaman oleh anggota sudah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Kementrian Pertanian. Tata cara permohonan dan pencairan dana pembiayaan yang ditetapkan oleh LKM-A Harapan Bundo yaitu : 1) peminjam mengajukan permohonan dengan mengisi formulir surat permohonan pembiayaan, surat persetujuan dan surat rekomendasi dari ketua kelompok tani, 2) setelah itu dilakukan survey terhadap peminjam, 3) setelah survey dilakukan maka dibuat berita acara atas hasil survey yang dilakukan, 4) dilaksanakan rapat komite antara pengelola LKM-A dan pengurus Gapoktan untuk memutuskan layak atau tidaknya diberikan pinjaman sesuai yang diajukan, dan 5) kasir baru bisa mencairkan pinjaman bila hasil rapat komite telah diputuskan untuk mencairkan dana. Jadi prosedur peminjaman dan pencairan dana pinjaman di LKM-A Harapan Bundo ini juga melibatkan pengurus Gapoktan terutama ketua pengurus.

#### 4.3.2. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo

LKM-A Harapan Bundo juga membuat beberapa buah buku pencatatan yang digunakan untuk membantu pengelola dan memberikan informasi kepada anggota dan pihak-pihak yang membutuhkan. Pencatatan-pencatatan tersebut secara khusus diperuntukkan untuk mempermudah kerja pengelola LKM-A dalam mengelola keuangan juga untuk menghindari kesalahan dalam membuat laporan-laporan yang dibutuhkan. Pencatatan-pencatatan tersebut diantaranya :

1. Buku data base anggota
2. Buku daftar simpanan anggota
3. Buku daftar pinjaman anggota
4. Buku daftar denda anggota
5. Buku daftar anggota yang mengajukan pinjaman
6. Buku profil LKM-A.

Setelah melakukan pencatatan LKM-A Harapan Bundo akan melaporkan hasil dari pencatatan yang diperoleh. Pelaporan ini berguna untuk mengetahui perkembangan keuangan LKM-A Harapan Bundo baik untuk jangka waktu per bulan maupun jangka waktu per tahun. Laporan yang dibuat kemudian dikirimkan secara reguler kepada PMT yang kemudian diolah dan dilaporkan oleh PMT ke tim teknis tingkat propinsi dan tim teknis pusat. Secara umum, laporan-laporan tersebut meliputi :

1. Laporan Bulanan, yang berisi tentang laporan perkembangan dana PUAP tiap bulannya. Disamping itu juga berisikan jumlah simpanan/tabungan anggota dan data-data lain. Laporan ini ditandatangani oleh manajer umum dan bagian keuangan.
2. Laporan Tahunan, yang berisi tentang akumulasi jumlah pembiayaan selama satu tahun bersama jumlah bunga pembiayaan yang diperoleh LKM-A. Kemudian laporan ini juga berisi akumulasi laba/rugi yang diperoleh dan juga sisa hasil usaha yang diperoleh pada tahun tersebut. Laporan ini ditandatangani oleh ketua Gapoktan.
3. Buku Evaluasi (bulanan) Kegiatan Usaha Gapoktan tentang jalannya operasional LKM-A. Buku laporan ini berisi tentang evaluasi pembiayaan, tabungan, bunga yang diperoleh dari anggota, hasil evaluasi dan laporan

permasalahan yang mungkin dihadapi oleh LKM-A Harapan Bundo dalam mengelola keuangan. Buku evaluasi ini ditandatangani oleh ketua Gapoktan.

4. Laporan LKM-A untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan ini berisi tentang laporan rugi laba LKM-A selama satu tahun pelaporan, neraca keuangan LKM-A selama satu periode, laporan posisi kekayaan/modal bersih selama satu tahun, laporan pembiayaan berdasarkan jumlah anggota yang meminjam dan mengembalikan pinjaman selama satu tahun laporan, dan laporan sisa hasil usaha yang diperoleh LKM-A selama setahun. Laporan ini ditandatangani oleh manajer dan bidang keuangan.

Pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh LKM-A. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh LKM-A maka LKM-A Harapan Bundo dapat menilai bagaimana kinerja LKM-A tersebut dalam melakukan pengelolaan keuangan. Dengan begitu LKM-A akan berusaha untuk mencari solusi permasalahan tersebut sehingga nantinya akan mampu memajukan LKM-A Harapan Bundo kedepannya.

#### 4.3.3. Sistem dan Persyaratan Anggota untuk Meminjam

Tabel berikut ini menjelaskan isi dari masing-masing syarat yang diberikan pengelola LKM-A kepada anggota yang ingin meminjam :

Tabel 10. Syarat yang harus dipenuhi anggota LKM-A

No.	Aspek Persyaratan	Komponen Persyaratan/keterangan
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Duplikasi kartu tanda penduduk yang berlaku dijadikan syarat
2	Kartu Keluarga (KK)	Foto copy kartu keluarga yang berlaku diberikan sebagai syarat
3	Surat Rekomendasi	a. Rekomendasi dari ketua Gapoktan b. Biodata anggota c. Biodata ketua poktan d. Tanda tangan yang menerima rekomendasi, ketua poktan, ketua Gapoktan Harapan Bundo (lampiran 16)
4	Data Permohonan Pembiayaan	a. Data pribadi b. Data usaha c. Bantuan yang ada

		d. Kesanggupan mengangsur e. Sumber pelunasan (lampiran 17)
5	Surat Persetujuan	a. Data peminjam b. Data suami/istri c. Tanda tangan yang menerima persetujuan, yang membuat persetujuan ketua LKM-A (lampiran 18)
6	Rencana Usaha Anggota(RUA)	a. Biodata anggota b. Jenis usaha produktif c. Kode usaha produktif d. Volume usaha e. Kebutuhan biaya f. Jadwal permintaan (lampiran 19)
7	Lampiran RUA	a. Nama anggota b. Jenis usaha c. Volume usaha d. Kebutuhan biaya e. Rincian biaya (lampiran 20)

Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2014 (data diolah)

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa persyaratan yang harus dipenuhi anggota berupa surat rekomendasi, data permohonan pembiayaan, surat persetujuan, Rencana Usaha Anggota terdapat persetujuan dari pihak keluarga anggota dan ketua Poktan sebagai penanggung jawab apabila nantinya peminjam bermasalah untuk mengembalikan pinjaman, ini merupakan tindakan antisipasi terjadinya kredit macet. Menurut anggota LKM-A Harapan Bundo, persyaratan ini tidak menyulitkan karena persyaratan ini diberikan oleh LKM-A dan diisi oleh anggota berdasarkan tutunan dari pengelola LKM-A.

#### **4.4. Efektivitas Pengelolaan Keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo**

##### **4.4.1. Jumlah Anggota yang Memperoleh Bantuan Modal Usaha**

Dana yang dimiliki oleh Gapoktan Harapan Bundo yang berasal dari BLM-PUAP dikelola oleh LKM-A Harapan Bundo, selanjutnya dana yang dimiliki digulirkan kepada anggota yang tergabung pada LKM-A. Anggota-anggota tersebut merupakan masyarakat yang memiliki usaha produktif pada bidang pertanian.

Dana yang dimiliki oleh LKM-A yang digulirkan kepada anggota, pembayarannya dilakukan melalui sistem angsuran/cicilan. Setiap kali anggota meminjam, maka anggota tersebut harus membayar pinjaman tersebut selama 10

kali cicilan selama 10 bulan dan membayar jasa pinjaman atau bunga sebesar 15% dari total pinjaman atau jasa pinjaman tersebut 1,5 % per bulannya.

Dana yang dimiliki oleh LKM-A ini digulirkan kepada anggota kapan saja, tidak ada waktu tertentu yang ditetapkan oleh pengelola LKM-A untuk dapat melakukan pinjaman. Namun itu semua juga tergantung pada dana yang tersedia pada LKM-A, sehingga terkadang pada saat dana tidak tersedia, anggota yang mengajukan pinjaman tidak dapat dengan cepat memperoleh pinjaman. Anggota tersebut harus menunggu sampai dana tersedia pada LKM-A. Selain dana yang tersedia pada LKM-A, perguliran dana ini juga tergantung pada kelayakan usaha anggota dan karakter anggota yang melakukan pinjaman. Karakter anggota ini merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan memberikan pinjaman benar-benar dapat dipercaya dan ini merupakan ukuran kemauan membayar (Kasmir, 2002).

Jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal usaha dari LKM-Harapan Bundo ini dapat mempengaruhi jumlah pendapatan LKM-A Harapan Bundo dalam melakukan kegiatan operasional LKM-A. Banyaknya jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal usaha per bulan di LKM-A Harapan Bundo selama satu tahun ( Januari s/d Desember 2013) dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini :

Tabel 11. Banyaknya Jumlah Anggota yang Memperoleh Bantuan Modal Usaha Selama Satu Tahun ( Januari s/d Desember 2013)

No.	Bulan	Jumlah Anggota yang Memperoleh Bantuan Modal	Keterangan
1	Januari	3	-
2	Februari	5	66,67 %
3	Maret	2	(60 %)
4	April	3	50 %
5	Mei	2	(33,33 %)
6	Juni	3	50 %
7	Juli	1	(66,67 %)
8	Agustus	1	Tetap
9	September	4	300 %
10	Oktober	1	(75 %)
11	November	2	50 %
12	Desember	4	100 %
Total		31*	

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 11 terlihat bahwa jumlah anggota yang menerima bantuan modal usaha pada LKM-A Harapan Bundo sepanjang tahun 2013 tidak selalu sama, pada bulan-bulan tertentu mengalami peningkatan seperti pada Februari, April, Juni, September, November, dan Desember, sedangkan pada bulan Maret, Mei, Juli, dan Oktober mengalami penurunan.

Dari tabel 11 juga terlihat bahwa untuk periode selama satu tahun ( Januari s/d Desember 2013), jumlah anggota yang paling banyak memperoleh bantuan modal usaha dari LKM-A adalah pada bulan Februari berjumlah 5 orang dan paling sedikit adalah pada bulan Juli, Agustus, dan Oktober adalah sebanyak 1 orang.

Total jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal dari LKM-A Harapan Bundo selama satu tahun (Januari s/d Desember 2013) pada tabel 11 adalah sebanyak 31 orang (96,88 %) dari total anggota pengguna dana berdasarkan realisasi awal pencairan dana BLM PUAP (lampiran 13, 14,dan 15). Jumlah total anggota yang memperoleh bantuan modal ini termasuk dalam kategori banyak sesuai dengan penggolongan kategori persentase jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal pada tabel 1.

LKM-A Harapan Bundo kurang mampu dalam menjangkau anggota untuk mendapatkan bantuan modal usaha, hal ini akan menyebabkan usaha anggota berjalan tidak lancar atau tidak berkembang. Karena bantuan yang akan diterima oleh anggota akan dapat dijadikan sebagai modal usaha. Dimana modal ini merupakan unsur produksi yang paling penting, tanpa modal segalanya tidak akan berjalan atau akan terhambat, modal tersebut digunakan oleh anggota untuk membeli faktor produksi dan menerapkan teknologi baru.

Ketidak efektifan kredit program dalam menjangkau jumlah anggota untuk memperoleh bantuan modal menyebabkan sebagian besar anggota kecil masih tetap mengandalkan kredit lembaga informal (Ashari dalam Supriatna, 2009).

#### **4.4.2. Besarnya Akumulasi Modal oleh LKM-A Harapan Bundo**

Menurut Kadarsan (1995) modal pertanian adalah faktor produksi yang disalurkan, dikelola, dan dikontrol didalam kegiatan ekonomi disektor pertanian dalam arti luas, dan merupakan salah satu sektor ekonomi nasional.

Modal diartikan sebagai kekayaan bersih atau ekuitas pemilik bisnis atau dalam konteks manajemen, modal diartikan sebagai keseluruhan aktiva sehingga mencakup ekuitas dan utang bisnis (Firdaus, 2010). Sedangkan akumulasi modal adalah keseluruhan atau total modal yang terkumpul atau yang dimiliki oleh LKM-A dalam periode waktu tertentu.

Efektivitas pengelolaan keuangan dilihat dari besarnya akumulasi modal oleh LKM-A Harapan Bundo dapat dinilai melalui analisis rasio keuangan yang terdiri dari; 1) rasio likuiditas, 2) rasio solvabilitas, 3) rasio profitabilitas, dan 4) rasio produktivitas penanaman modal (Kadarsan, 1995).

### **1. Rasio Likuiditas**

Rasio Likuiditas berguna untuk menunjukkan kesanggupan LKM-A membayar hutang kapan saja, tanpa mengganggu jalannya LKM-A.

- i. Untuk rasio jangka pendek nilai yang diperoleh dari perhitungan (lampiran 25) adalah 3. Hal ini menunjukkan sejauh mana aset jangka pendek (aktiva lancar) dapat menutupi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) semakin besar perbandingan antara aset jangka pendek (aktiva lancar) dengan hutang jangka pendek (hutang lancar) maka semakin tinggi kemampuan LKM-A dalam menutupi hutang jangka pendeknya.
- ii. Untuk rasio cepat nilai yang diperoleh dari perhitungan (lampiran 25) adalah 3. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan LKM-A dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan dan inventaris yang dimiliki LKM-A tersebut. Rasio ini sebenarnya berguna untuk mengukur kemampuan LKM-A sesungguhnya untuk memenuhi hutang-hutangnya tepat pada saatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer LKM-A Harapan Bundo, LKM-A pernah mengajukan kerja sama dengan CSR PT Semen Padang, namun PT Semen Padang mengajukan pemberian pinjaman kepada LKM-A. Sebelum pihak LKM-A memutuskan untuk menerima pinjaman tersebut, pihak pengelola mencoba menghitung besaran angsuran yang harus dibayar tiap bulannya kepada pihak PT semen Padang. Jumlah angsuran yang harus dibayarkan ternyata sangat besar dan jika pinjaman tersebut diterima dan terjadi kredit macet, maka pinjaman

ini akan menimbulkan masalah bagi LKM-A, dimana kemungkinan terburuknya LKM-A Harapan Bundo akan gulung tikar.

Oleh karena LKM-A Harapan Bundo tidak mempunyai hutang dengan pihak manapun, maka dari sini dapat dikatakan bahwa LKM-A Harapan Bundo memiliki likuiditas yang baik.

## **2. Rasio Solvabilitas**

Rasio solvabilitas berguna untuk mengetahui sisa aset LKM-A setelah semua aset LKM-A diuangkan dan semua hutang dibayarkan. Jika kekayaan sama atau lebih besar dari hutang maka LKM-A Solvabel.

- i. Untuk rasio modal dengan total aktiva nilai yang diperoleh berdasarkan perhitungan (lampiran 25) adalah 1. Rasio ini menunjukkan pentingnya dari sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki kreditor. Semakin tinggi rasio ini maka semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva LKM-A.
- ii. Untuk rasio modal bersih nilai yang diperoleh berdasarkan perhitungan (lampiran 25) adalah 3. Rasio ini menunjukkan kemampuan LKM-A menutupi semua kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya dengan harta yang dimiliki jika seandainya LKM-A tersebut dilikuidasi. Rasio modal bersih menggambarkan kedudukan likuiditas dan solvabilitas LKM-A yang akan diperlihatkan melalui kelestarian dan posisi keuangan LKM-A. Rasio modal bersih ini menyangkut konsep jangka panjang yang menggambarkan kelestarian perusahaan karena didalamnya termasuk pula pemakaian modal tidak bergerak, aset jangka panjang dan aset jangka menengah lainnya (Kadarsan, 1995).

## **3. Rasio Profitabilitas (Rentabilitas).**

Rasio profitabilitas berguna untuk mengukur efisiensi input terhadap output. Berdasarkan perhitungan profitabilitas untuk LKM-A Harapan Bundo (lampiran 23), dapat diketahui bahwa :

- i. Untuk rasio operasional, nilai yang diperoleh berdasarkan perhitungan (lampiran 25) adalah 3, karena hasil perhitungan rasio operasional LKM-A Harapan Bundo adalah sebesar 35,92 %, nilai ini kecil dari standar

yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Rasio operasional mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan, semakin tinggi rasio operasional maka semakin menunjukkan keadaan yang kurang baik bagi LKM-A.

- ii. Untuk rasio tetap, LKM-A Harapan Bundo memperoleh nilai 3 (lampiran 25) karena hasil perhitungan rasio tetap LKM-A Harapan Bundo adalah sebesar 80,39%, nilai ini kecil dari standar yang telah ditetapkan yaitu 100 %.
- iii. Untuk rasio kotor, LKM-A Harapan Bundo memperoleh nilai 1 (lampiran 25) karena hasil perhitungan rasio kotor LKM-A Harapan Bundo adalah sebesar 100,16 %, nilai ini lebih besar dari standar yang telah ditetapkan yaitu 100 %.

#### **4. Rasio Produktivitas Penanaman Modal**

Rasio produktivitas penanaman modal berguna untuk mengukur efisiensi penanaman modal pada LKM-A Harapan Bundo, sehingga dari hasil perhitungan rasio tersebut dapat diketahui apakah penambahan modal investasi bisa menguntungkan atau tidak.

Adanya modal yang cukup sangat penting bagi perusahaan karena dengan modal yang cukup itu memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan-kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis keuangan (Munawir, 2004). Begitu juga dengan LKM-A Harapan Bundo, modal yang cukup akan membantu memperlancar beroperasinya LKM-A Harapan Bundo ini.

Modal yang cukup memang sangat penting bagi perusahaan, namun kecukupan modal antara sebuah perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain akan berbeda, hal ini terjadi karena modal yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tergantung atau dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1) sifat atau tipe perusahaan; 2) tingkat perputaran piutang; 3) tingkat perputaran persediaan; 4) jumlah rata-rata pengeluaran uang setiap hari; 5) besar kecilnya perusahaan dan lain-lain (Munawir, 2004).

Oleh karena itu, analisa rasio harus mampu disesuaikan dengan faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu tertentu dengan faktor-faktor dimasa datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi

perusahaan yang bersangkutan, dimana laporan keuangan ini merupakan hasil dari kombinasi dari fakta yang tercatat, anggapan atau kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi serta pendapat pribadi (Munawir, 2004).

Dari perhitungan rasio produktivitas penanaman modal LKM-A Harapan Bundo pada Lampiran 23 maka dapat diketahui bahwa :

- i. Rasio hasil investasi modal, LKM-A Harapan Bundo memiliki rasio investasi modal sebesar 0,08 ini berarti bahwa setiap Rp 1 yang diinvestasikan penerimaan kotor bertambah Rp 0,08. Untuk rasio hasil investasi modal standar yang ditetapkan adalah 1. Rasio investasi modal LKM-A Harapan Bundo memperoleh nilai 1 karena hasil perhitungan yang diperoleh ( 0,08) kecil dari standar yang ditetapkan yaitu 1. Hal ini menunjukkan bahwa LKM-A Harapan Bundo belum memiliki kemampuan yang optimal dalam memperoleh penerimaan dibandingkan dengan rata-rata investasi modal yang ditanamkan.
- ii. Tingkat hasil investasi modal pada LKM-A Harapan Bundo adalah sebesar 1,4 %. Untuk tingkat hasil investasi modal standar yang ditetapkan adalah sebesar 20 %. Tingkat hasil investasi modal LKM-A Harapan Bundo memperoleh nilai 1 karena hasil perhitungan yang diperoleh (1,4 %) kecil dari standar yang ditetapkan yaitu 20 %. Hal ini menunjukkan bahwa LKM-A Harapan Bundo belum mampu mengoptimalkan investasi modal bersih dibandingkan dengan rata-rata investasi modal yang dilakukan.

Berdasarkan analisis rasio keuangan LKM-A Harapan Bundo, maka akan diperoleh total nilai dari perhitungan rasio keuangan LKM-A Harapan Bundo seperti pada Tabel 12.

Tabel 12. Total Nilai yang Diperoleh dari Perhitungan Rasio Keuangan pada LKM-A Harapan Bundo pada Periode Januari s/d Desember 2013

Rasio Keuangan	Nilai
1. Rasio Likuiditas	
a. Rasio Jangka Pendek	3
b. Rasio Cepat	3
2. Rasio Solvabilitas	

a. Rasio modal dengan total aktiva	1
b. Rasio Modal Bersih	3
3. Rasio Profitabilitas/Rentabilitas	
a. Rasio Operasional	3
b. Rasui Tetap	3
c. Rasio Kotor	1
4. Rasio Produktivitas Penanaman Modal	
a. Rasio Hasil Investasi Modal	1
b. Tingkat Hasil Investasi Modal	1
Total	19

Sumber : Data Primer Diolah

Selanjutnya total nilai yang diperoleh akan dicocokkan pada tabel indeks keuangan LKM-A Harapan Bundo selama satu tahun ( Januari s/d Desember 2013) (Tabel 13). Sehingga dengan pencocokkan nilai tersebut dengan tabel indeks keuangan LKM-A Harapan Bundo, maka akan diketahui di kategori mana posisi LKM-A Harapan Bundo tersebut.

Tabel 13. Indek Keuangan LKM-A Harapan Bundo Selama Satu Tahun ( Januari s/d Desember 2013).

Kategori	Rantang
Sehat	22 – 27
Cukup Sehat	16 – 21
Kurang Sehat	9 – 15

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 13, akumulasi keuangan LKM-A Harapan Bundo terletak pada kategori kurang sehat, karena total nilai yang diperoleh dari perhitungan analisis rasio keuangan LKM-A Harapan Bundo adalah sebesar 7. Hal ini terjadi karena LKM-A belum secara optimal menggiatkan anggotanya untuk mau berinvestasi pada LKM-A dan kegiatan penggalangan dana yang belum optimal serta kurangnya kerja sama dengan pihak lain.

Selanjutnya untuk menarik suatu kesimpulan dari efektivitas pengelolaan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo maka hasil yang diperoleh dari perhitungan jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal dari LKM-A Harapan Bundo dan akumulasi modal oleh LKM-A harapan Bundo dicocokkan

pada matriks efektivitas pengelolaan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo dan titik potong dari kedua variabel tersebut merupakan kesimpulan yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 14 dibawah ini :

Tabel 14. Matrik Efektivitas Pengelolaan Keuangan Oleh LKM-A Harapan Bundo

Persentase Jumlah Anggota memperoleh Bantuan Modal	Akumulasi Modal oleh LKM-A Harapan Bundo		
	Kurang Sehat ( 9 – 15 )	Cukup Sehat ( 16 – 21 )	Sehat ( 22 – 27 )
Sedikit ( < 50% )	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
Sedang ( 50 – 80 % )	Tidak Efektif	Cukup Efektif	Cukup Efektif
Banyak ( > 80 % )	Tidak Efektif	Cukup Efektif	Efektif

Sumber : Data Primer Diolah

Dari tabel 14 terlihat bahwa pengelolaan keuangan oleh LKM-A Harapan Bundo tergolong pada kategori yang cukup efektif. Hal ini terjadi karena jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal dari LKM-A Harapan Bundo berjumlah 31 orang (96,88 %) dari total anggota pengguna dana berdasarkan realisasi awal pencairan dana BLM PUAP( 32 orang) dan pendapatan yang diperoleh dari jumlah anggota yang meminjam tersebut adalah sebesar Rp. 10.635.000,-, sedangkan total biaya yang dikeluarkan oleh LKM-A Harapan Bundo adalah Rp. 12.371.000,-. Total pendapatan yang diterima LKM-A Harapan Bundo ini lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkannya selama satu tahun. Sehingga hal ini menyebabkan LKM-A Harapan Bundo mengalami kerugian.

Kerugian yang dialami LKM-A Harapan Bundo juga dapat dilihat pada akumulasi keuangan LKM-A Harapan Bundo yang tergolong pada kategori kurang sehat. Hal ini terjadi karena LKM-A Harapan Bundo belum secara optimal menggiatkan anggotanya untuk mau berinvestasi pada LKM-A dan kegiatan penggalangan dana yang belum optimal serta kurangnya kerja sama dengan pihak-pihak lain.

Dengan demikian LKM-A Harapan Bundo harus dapat melakukan pengelolaan yang lebih baik lagi terhadap keuangannya dan menghimbau anggota untuk mau berinvestasi. Sehingga untuk kedepannya permodalan LKM-A dapat meningkat dan mampu memperlancar kegiatan yang dilakukan LKM-A Harapan Bundo.

Efektif tidaknya suatu pengelolaan keuangan pada lembaga keuangan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan ditingkat petani sebagai anggota dan masyarakat pada umumnya. Karena lembaga keuangan ini tidak hanya menyalurkan dana dari masyarakat, namun juga untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dalam menghimpun dana dari masyarakat ini lah sangat diperlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat ini. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan yang baik akan meningkatkan citra lembaga keuangan dikalangan perbankan, sehingga kepercayaan perbankan pada kepada lembaga keuangan mikro akan semakin baik.

#### **4.4.3. Permasalahan yang Dihadapi LKM-A Harapan Bundo Dalam Pengelolaan Keuangan**

Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik.

Sebagai suatu lembaga yang didirikan untuk menyediakan modal kerja bagi anggota dan masyarakat di lingkungan sekitar dan membudayakan minat menabung di masyarakat, LKM-A hendaknya dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah untuk menjalankan aktivitas lembaga perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang pengelolaan keuangan LKM-A, mempunyai komitmen dan kemampuan yang tinggi untuk memajukan LKM-A.

Berdasarkan hasil penelitian dan survei dilapangan, bahwa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di LKM-A Harapan Bundo meliputi :

##### **1. Keterbatasan dana yang tersedia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer LKM-A dalam pemanfaatan dana, anggota LKM-A yang akan melakukan peminjaman terkadang mengalami kendala seperti anggota harus menunggu untuk dapat memperoleh peminjaman dari LKM-A hal ini disebabkan oleh dana yang

ada tidak tersedia di LKM-A atau terbatas. Keterbatasan dana ini disebabkan ada beberapa anggota kurang mematuhi kewajiban untuk mencicil secara teratur pinjaman yang telah mereka lakukan.

## 2. Pembukuan keuangan

Kegiatan pembukuan di LKM-A dibagi menjadi dua kelompok yakni pembukuan non keuangan dan pembukuan keuangan. Berdasarkan pengamatan peneliti pada buku-buku administrasi termasuk buku keuangan yang dimiliki oleh LKM-A Harapan Bundo terlihat bahwa adanya pencatatan yang tidak sistematis, akibatnya memungkinkan terjadi kekeliruan dalam perhitungan.

## 3. Proses pencairan dan pemanfaatan pinjaman

Proses pencairan dana kepada anggota mengalami kendala seperti anggota yang akan meminjam tidak dapat langsung memperoleh dana ketika melakukan permohonan. Berdasarkan wawancara dengan manajer waktu yang paling cepat bagi anggota untuk dapat memperoleh pembiayaan adalah seminggu dan paling lama adalah sebulan. Selain itu, pencairan dana oleh LKM-A kepada anggota tergantung juga pada analisa kelayakan usaha anggota dan urutan/waktu pada saat anggota mengajukan permohonan pinjaman. LKM-A Harapan Bundo memberlakukan sistem antrian yaitu anggota yang memasukkan permohonan yang lebih dahulu lah yang akan diproses permohonannya terlebih dahulu.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LKM-A Harapan Bundo tergolong pada kategori cukup efektif karena: a) LKM-A Hanya mampu memberikan pembiayaan kepada anggota sebanyak 31 orang (96,88%) dalam satu tahun (Januari s/d Desember 2013) dari total anggota pengguna dana berdasarkan realisasi awal pencairan dana BLM PUAP (32 orang) dengan total pendapatan yang diperoleh adalah Rp. 10.635.967,-. Total pendapatan yang diterima oleh LKM-A Harapan Bundo ini lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 12.371.967, b) akumulasi modal LKM-A Harapan Bundo tergolong pada kategori Cukup sehat dan LKM-A Harapan Bundo mengalami kerugian dimana pendapatan lebih kecil dari pada pengeluaran.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh LKM-A Harapan Bundo dalam pengelolaan keuangan adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga anggota yang melakukan peminjaman tidak dapat langsung memperoleh pinjaman, dan proses pencairan dana kepada anggota dimana anggota harus menunggu hingga permohonan pinjamannya diproses dan diputuskan untuk dicairkan. Selain itu, dalam segi pembukuan ada beberapa pencatatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi seperti pencatatan yang dilakukan secara tidak sistematis.

### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. LKM-A Harapan Bundo sebaiknya lebih mampu mempercepat perputaran modal untuk dapat meningkatkan jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal dan menjalin kerja sama atau kemitraan dengan lembaga

keuangan lain dengan menerapkan prinsip bagi hasil. Sehingga hal ini mampu meningkatkan akumulasi modal LKM-A Harapan Bundo dan juga meningkatkan jumlah anggota yang memperoleh bantuan modal usaha.

2. Di sarankan LKM-A Harapan Bundo menetapkan sistem penghargaan bagi anggota yang paling cepat dalam pembayaran pinjaman yang diadakan sekali dalam setahun. Sehingga dengan hal ini dapat mengurangi kredit macet yang etrjadi di LKM-A Harapan Bundo.
3. Pengelola LKM-A sebaiknya lebih selektif dalam memutuskan pemberian pinjaman kepada anggota yang mengajukan permohonan pinjaman dan mengikuti pelatihan-pelatihan, seperti manajemen kepemimpinan untuk dapat memahami watak anggota serta bisa menarik anggota gapoktan yang tidak tergabung di LKM-A untuk mau bergabung . Selain itu pengelola hendaknya mengikuti pelatihan tentang pencatatan pembukuan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi.
4. Bagi pemerintah setempat dan instansi terkait diharapkan peran aktifnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan LKM-A yang ada di kelurahan Lubuk Lintah, terutama pembinaan yang melibatkan pengurus LKM-A karena keberhasilan dalam pengelolaan keuangan LKM-A sangat tergantung pada kemampuan pengurus. .

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Ade. (2003). *Analisis Consumer Decision Model untuk Pengukuran Efektifitas Periklanan. Dalam Jurnal Imiah Manajemen dan Bisnis* [Online].Vol 3 (1).14 hal.
- Anonim. 2011. *Koperasi dan Ilusi Kesejahteraan, Model Solusi Efektif untuk Koreksi Distorsi Pasar*. Artikel. <http://www.depkop.go.id> [29/09/2012]
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Analisis kebijakan Pertanian 4 (2): 146-164.
- Astuti, Dewi. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Darsono. 2005. *Pedoman Praktis Laporan Keuangan*. Yogyakarta
- [Deptan] DepartemenPertanian. 2004. *Ketahanan Pangan dan Penyedia Lapangan Kerja* : Jakarta.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2009. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)*. Jakarta. Departemen Pertanian. 27 hal.
- [Deptan] DepartemenPertanian. 2009. *Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)*. Jakarta. DepartemenPertanian. 36 hal.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2003. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Iskandar.2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta
- Ismawan, Bambang. 2010. *Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah. Jurnal Ekonomi Rakyat*. ArtikelTH.IINo.1. <http://www.ekonomirakyat.org/edisi/13> artikel1.htm.[18/02/2011].
- Kadarsan, Halimah W. *Keuangan Pertanian dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis*. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Kasmir, 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Kementrian, Pertanian. 2010. *Modul Pengembangan LKM-A*.Kementrian Pertanian. Jakarta. 30 hal.
- Kementrian, Pertanian. 2010.*Petunjuk Teknis Pemeringkatan (rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A*.Kementrian Pertanian. Jakarta. 25 hal.
- Kementrian, Pertanian. 2011. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)*. Kementrian Pertanian. 46 hal.

- Martowijoyo, S. 2002. *Dampak Lembaga Pedesaan Terhadap Kinerja Sistem Perkreditan Bank*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Th. I No. 5
- Munawir. 2000. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Samanta, Purnama Sari. 2011. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Terhadap Perkembangan Usaha Agroindustri Anggota (Studi Kasus: KSU LKM-A Prima Tani di Kecamatan Baso Kabupaten Agam)*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Setyarini, P. Dewi. 2008. *Evaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Swamitra Mina dengan Pendekatan Balance Scorecard (Studi Kasus di Kab. Bantul, Yogyakarta)*. [Skripsi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Sukmaniar. 2007. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. [Tesis]. Semarang. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
- Sumodiningrat, G. 2003. *Optimalisasi Unit Pengelola Keuangan dalam Perguliran Dana sebagai Modal Usaha*. <http://www.suniscome.com>.
- Supriatna, Ade. 2009. *Pola Pembiayaan Sistem Kredit Mikro Usaha Tani di Tingkat Pedesaan*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian Volume 28. Nomor 3, Agustus 2009, hal. 111-118.
- Suyatno, Thomas et al. 2007. *Kelembagaan Perbankan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 126 hal.
- Wadi, Syahrul. 2010. *Analisa Fungsi LKM-A "Suri Indah" Gapoktan Sinamar dalam Mengelola Dana Program BLM-PUAP Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Sulik i Kabupaten Lima Puluh Kota*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 141 hal.
- Wijono, W.W. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Edisi Khusus. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/bkf/kajian/wiloejo-1.pdf>.

Tabel 1. Kuota Lokasi Penerima PUAP menurut Provinsi tahun 2008

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kuota Desa
1	NAD	19	600
2	Sumatera Utara	19	475
3	Sumatera Barat	12	208
4	Riau	10	182
5	Jambi	9	208
6	Bengkulu	9	292
7	Sumatera selatan	12	369
8	Lampung	9	269
9	Bangka Belitung	6	63
10	Kepulauan Riau	4	54
11	DKI Jakarta	4	15
12	Jawa Barat	19	529
13	Jawa Tengah	30	987
14	D.I Yogyakarta	4	127
15	Jawa Timur	30	987
16	Banten	5	138
17	Bali	9	137
18	NTB	8	220
19	NTT	18	522
20	Kalimantan Barat	11	244
21	Kalimantan Tengah	13	225
22	Kalimantan Selatan	11	355
23	Sulawesi Utara	9	214
24	Sulawesi Selatan	20	417
25	Sulawesi Tenggara	10	315
26	Sulawesi Barat	4	110
27	Gorontalo	5	134
28	Maluku	7	195
29	Maluku Utara	6	145
30	Papua Barat	8	230
31	Papua	20	505
32	Sulawesi tengah	9	290
33	Kalimantan Timur	8	239

Lampiran 2. Rincian Gapoktan yang Menerima BLM PUAP Tahap 1

No	Gapoktan	Kecamatan	Kelurahan	Penyuluh Pendamping	Ketua Gapoktan	Manager LKMA	Poktan	
							Jumlah	Anggota
1	Agro Floris	Koto Tengah	Lubuk Minturun	Yuharmilis	Jamaris	Rustam	11	178
2	Batu Gadang Bersama	Lubuk Kilangan	Batu gadang	Hermanto	Basri Dt. Rajo Usali	Syafril	6	288
3	Harapan Bersama	Pauh	Limau Manis	Syaiful Akmam	Ramli RB	Herman	3	49
4	Harapan Bundo	Lubuk Lintah	Lubuk Lintah	Yulia Agus	Yulisman	Syamsurizal	3	92
5	Harapan jaya	Nanggalo	Gurun Lawas	Dardanelly	Ramli	Fitra Hadi	3	99
6	Jaya Bersama	Koto Tengah	Batiouh Panjang	Alimin	Hamzah	Masriadi	8	288
7	Sepakat	Nanggalo	Kurao Pagang	Yuli agustina	Jumlisman	Dam Huri	6	158
Jumlah							40	1152

Sumber : Penyelia Mitra Tani, 2014

mpiran 3. Daftar Nama dan Jumlah Anggota kelompok Tani yang Tergabung dalam Gapoktan Harapan Bundo

	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Jumlah Anggota
	Saiyo Sakato	Yulisman, S.P	30
	Kanda batu Sakato	Jamaris, S.P	30
	Kampung Kalawi Timur	Basirun	32
	JUMLAH		

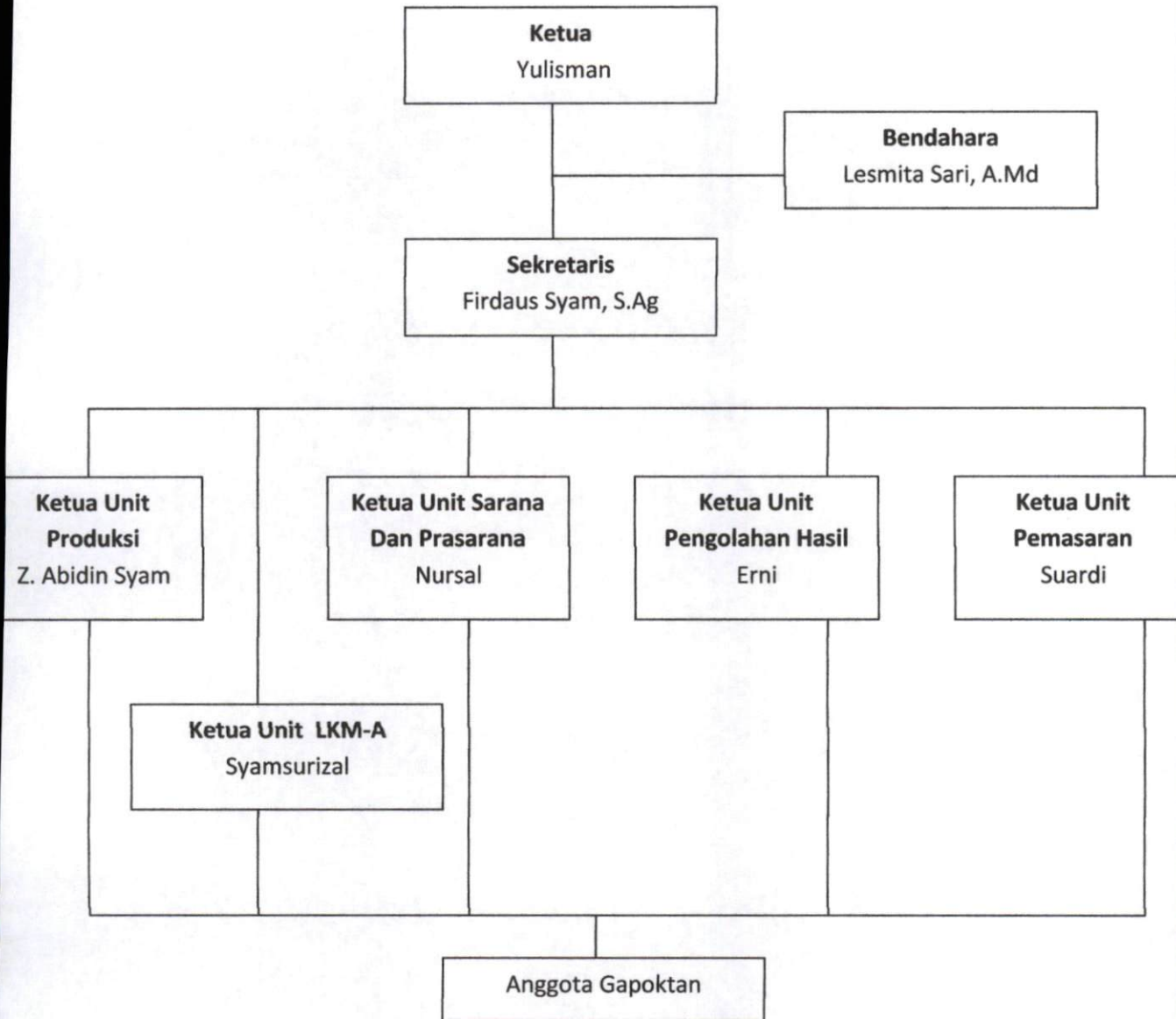
umber : Profil Gapoktan Harapan Bundo,2014

Lampiran 4. LKMA Terbaik pada Setiap Kabupaten / Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	Nama Gapoktan-LKMA	Alamat	Asset (Rp.)	Jumlah Poktan	Jumlah Anggota
1	Agam	Penampung Prima	Penampung, IV Angkek	253.000.000	29	593
2	Pasaman Barat	Sukma Karsa	Sariak Kt. Baru, Luhak Nan Duo	632.944.000	4	577
3	50 Kota	Prima Lestari	Sikabu – kabu, Luak	409.292.000	26	570
4	Padang	Harapan Bundo	Lubuk Lintah, Kuranji	122.486.350	3	92
5	Solok Selatan	Limbago Saiyo	Lubuak Gadang Timur, Sangir	180.977.000	5	90
6	Solok	Mutiara Sukarami	Koto Gaek Guguang, Gn. Talang	266.597.000	10	466
7	Pdg. Pariaman	Ruyung Ameh	Punco Ruyung, Padang Sago	124.369.000	3	107
8	Dharmasraya	TDU. Gn. Medan	Gunung Medan, Sitiung	450.000.000	6	150
9	Pesisir Selatan	Bina Usaha Tani	Koto Barapak, Bayang	111.430.000	10	74
10	Sijunjung	Takabua Sakato	Tj. Bonar Aur, Sumpur Kudus	225.226.000	15	504
11	Tanah Datar	Balaing sSani	Tabek, Pariangan	291.441.000	21	772
12	Pasaman	Khatulistiwa	Bonjol	217.000.000	4	81
13	Payakumbuh	Babagi Sasamo	Payakumbuh Timur	148.900.000	7	108

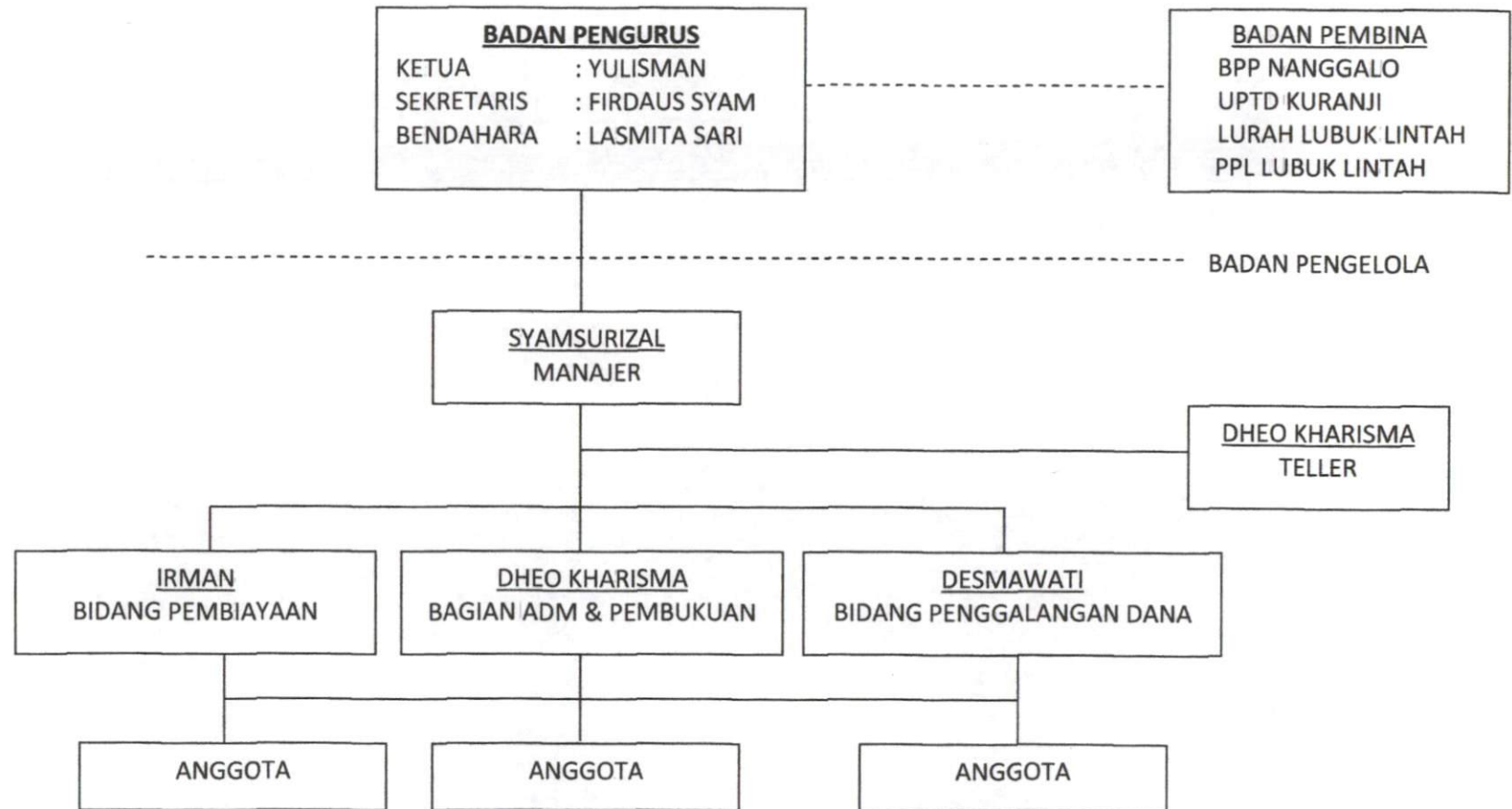
Sumber : Tim Penilai PUAP Sumatera Barat, 2011

## Lampiran 5. Struktur Organisasi Gapoktan Harapan Bundo



Sumber : Gapoktan Harapan Bundo, 2014

Lampiran 6. Struktur Pengurus LKM-A Harapan Bundo

**STRUKTUR PENGURUS LKMA HARAPAN BUNDO**

## Lampiran 7. Neraca LKM-A Harapan Bundo

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS HARAPAN BUNDO KEL. LUBUK LINTAH KEC. KOTA PADANG  
NERACA

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2013

<b>Aktiva</b>		<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>	
<b>AKTIVA LANCAR</b>		<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Kas Dan Bank	Rp. 1.244.450,-	Hutang Usaha	Rp. -
Investasi Jangka Pendek	Rp. -	Hutang Bank	Rp. -
Piutang Pinj. Anggota	<u>Rp. 114.830.500,-</u>	Hutang Pajak	Rp. -
Jumlah Aktiva Lancar	<u>Rp. 116.074.950,-</u>	Hutang Simpanan Anggota	<u>Rp. 5.679.950,-</u>
		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	<u>Rp. 5.679.950,-</u>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
Penyertaan Pada LKM-A	Rp. -	Hutang Bank	Rp. -
Penyertaan Pada Non LKM-A	<u>Rp. -</u>	Hutang Jangka Panjang lainnya	<u>Rp. -</u>
Jumlah Investasi Jangka Panjang	<u>Rp. -</u>	Jumlah Kew. Jangka Panjang	<u>Rp. -</u>
<b>AKTIVA TETAP</b>		<b>EKUITAS</b>	
Tanah	Rp. -	Simpanan Wajib	Rp. 10.221.000,-
Bangunan	Rp. -	Simpanan Pokok	Rp. 5.800.000,-
Mesin	Rp. -	Modal Penyertaraan Partisipasi Anggota	Rp. -
Inventaris	Rp. -	Modal Penyertaan	Rp. -
Jumlah Aktiva Tetap	<u>Rp. 3.890.000,-</u>	Modal Sumbangan	Rp. -
	<u>Rp. 3.890.000,-</u>	Dana PUAP	Rp. 100.000.000,-
		Laba/Rugi Bulan Berjalan	<u>(Rp. 1.736.000,-)</u>
		Jumlah Ekuitas	<u>Rp. 114.285.000,-</u>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<u>Rp. 119.964.000,-</u>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<u>Rp. 119.964.000,-</u>

## Lampiran 8. Laporan Laba/Rugi LKM-A Harapan Bundo Bersama Tahun 2013

**LAPORAN LABA/RUGI**

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Harapan Bundo Kel. Lubuk  
Lintah Kec. Kuranji Kota Padang

Periode 31 Desember 2013

**PENDAPATAN**

Penggantian Biaya Adm.	Rp. 1.040.000,-
Jasa Pinjaman	Rp. 9.392.500,-
Denda Pinjaman	Rp. 202.500,-

**JUMLAH PENDAPATAN** Rp. 10.632.000,-

**BIAYA****BIAYA OPERASIONAL**

ATK	Rp. 262.000,-
Konsumsi	Rp. 412.000,-
Sewa Gedung	Rp. 1.650.000,-
Lainnya	Rp. 1.488.000,-
Jumlah Biaya Operasional	Rp. 3.821.000,-

**BIAYA TETAP**

Tenaga Kerja	Rp. 7.350.000,-
Transportasi	Rp. 1.200.000,-
Jumlah Biaya Tetap	Rp. 8.550.000,-

**JUMLAH BIAYA** Rp. 12.371.000,-

**LABA / RUGI** ( Rp. 1.736.000,-

Sumber : Laporan Laba/Rugi (diolah)

## Lampiran 9. Keadaan Modal LKM-A Harapan Bundo per 31 Desember 2013

No	Sumber Modal	Jumlah (Rp)	Persentase (%) dari Keseluruhan Modal
1	Simpanan Pokok	5.800.000	4,99 %
2	Simpanan Wajib	10.221.000	8,81 %
3	Modal PUAP	100.000.000	86,2 %
	Jumlah	116.021.000	100 %

Sumber : Laporan Tahunan LKM-A Harapan Bundo, 2014

Gambaran 10. Jumlah Anggota LKM-A Harapan Bundo Menurut Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Anggota (orang)	Persentase (%)
Tanaman Padi Sawah	47	54,65
Peternakan	12	13,95
Pemasaran	8	9,30
Industri Rumah Tangga	19	22,10
Jumlah	86	100

Sumber : LKM-A Harapan Bundo, 2014

Empiran 11. Perkembangan Dana PUAP di LKM-A Harapan Bundo dari Bulan Januari s/d Desember 2013

No	Bulan	Jumlah Dana (Rp.)
1	Januari	121.700.950
2	Februari	121.698.650
3	Maret	122.108.650
4	April	122.140.150
5	Mei	121.667.350
6	Juni	121.820.650
7	Juli	121.509.750
8	Agustus	121.448.750
9	September	121.604.450
10	Oktober	121.360.850
11	November	121.105.450
12	Desember	120.819.450

Sumber: Laporan Bulanan Gapoktan Harapan Bundo,2013

## Lampiran 12. Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Harapan Bundo

**RENCANA USAHA BERSAMA (RUB) PUAP**

Nama Gapoktan : HARAPAN BUNDO

Tanggal Pengukuhan : 7 Januari 2008

Alamat Gapoktan : Kelurahan : Lubuk Lintah  
 Kec. : Kuranji  
 Kota : Padang  
 Prop. : Sumatera Barat

Pengurus Gapoktan : Ketua : Yulisman  
 Sekretaris : Firdaus Syam  
 Bendahara : Lasmita Sari

No. Rekening Gapoktan : 5468-01-007015-53-8

Nama Bank : BRI 5468 Unit Kuranji Cabang Padang

Alamat Bank : Jln. M. Yunus Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota  
 Padang.

No	Usaha Produktif	Satuan Volume (Ha, Ekor, RT, dll)	Nilai (Rp.)
I	<b>Budidaya (On-Farm)</b>		
	1.1 Tanaman pangan	13,5 Ha	27.105.000,-
	1.2 Holtikultura	0,5 Ha	1.350.000,-
	1.3 Peternakan	513 Ekor	17.900.000,-
	1.4 Perkebunan	-	-
II	<b>Non Budidaya</b>		
	2.1 Industri Rumah Tangga	4 RT	6.645.000,-
	2.2 Pemasaran Hasil Pertanian	5 RT	47.000.000,-
	2.3 Usaha Lain Berbasis pertanian		
	<b>TOTAL</b>		<b>100.000.000,-</b>

Sumber: Gapoktan Harapan Bundo, 2014

## Lampiran 13. Rencana Usaha Kelompok Saiyo Sakato

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (Ha,bks,Krg, Ekor)	Nilai (Rp.)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
	Firdaus	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 2009
	Amrizal	Pemasaran Padi	2.2	30 Krg	5.640.000,-	Agustus 2009
	Irman	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 2009
	Yunimar	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 2009
	Ridwan	Padi Sawah	1.1	0,5 Ha	1.010.000,-	Agustus 2009
	Yulisman	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 2009
	Nasril	Padi Sawah	1.1	0,5 Ha	1.010.000,-	Agustus 2009
	Ahmad	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 2009
	Herman	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 2009
0	Nursal	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 2009
1	Nofrisal	Hortikultura	1.2	0,5 Ha	1.170.000,-	Agustus 2009
2	Musda Fiardi	Itik Petelur	1.3	100 Ekor	5.410.000,-	Agustus 2009
3	Syamsurizal	Pemasaran padi	2.2	50 Krg	9.400.000,-	Agustus 2009
4	Z.dahlan	Industri RT	2.1	1000 Bks	500.000,-	Agustus 2009
5	Zamhar	Industri RT	2.1	2500 Bks	2.000.000,-	Agustus 2009
Jumlah					40.280.000,-	

Sumber : Gapoktan Harapan Bundo, 2014

## Lampiran 14. Rencana Usaha Kelompok Kandang Batu Sakato

Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (Ha,bks,Krg , Ekor)	Nilai (Rp.)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
Maifriadi	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 2009
Aprianis	Padi sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 2009
Syafril	Padi Sawah	1.1	1,5 Ha	2.771.000,-	Agustus 2009
Lasmita	T.Kambing	1.3	3 Ekor	2.400.000,-	Agustus 2009
Asyam	T.Kambing	1.3	4 ekor	3.500.000,-	Agustus 2009
Jasnita	T.Kambing	1.3	3 Ekor	2.400.000,-	Agustus 2009
Nurhaida	T.Kambing	1.3	3 Ekor	2.400.000,-	Agustus 2009
Erni	Industri RT	2.1	2.500 Bks	2.000.000,-	Agustus 2009
Zarni	Industri RT	2.1	1.575 Prg	1.260.000,-	Agustus 2009
Suardi	Pemasaran padi	2.2	50 Krg	9.400.000,-	Agustus 2009
Jamaris	Pemasaran padi	2.2	50 Krg	9.400.000,-	Agustus 2009
Jumlah				39.665.000,-	

Sumber : Gapoktan Harapan Bundo, 2014

lampiran 15. Rencana Usaha Kelompok Kampung Kalawi Timur

No	Nama Anggota	Jenis Usaha Produktif	Kode Usaha Produktif	Volume (Ha,bks,Krg , Ekor)	Nilai (Rp.)	Jadwal Waktu Pemanfaatan
	Desmawati	Pemasaran padi	2.2	50 Krg	9.400.000,-	Agustus 2009
	Syamsudin	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 2009
	Y.Muncak	Padi Sawah	1.1	1,5 Ha	3.030.000,-	Agustus 2009
	N.Sumarni	Padi Sawah	1.1	1,0 Ha	2.020.000,-	Agustus 2009
	Sutrisno	Ayam Potong	1.3	200 Ekor	2.200.000,-	Agustus 2009
	Mardiana	Industri RT	2.1	1.730 Bks	1.385.000,-	Agustus 2009
Jumlah					20.055.000,-	

Sumber : Gapoktan Harapan Bundo, 2014

# SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :  
 Tanggal lahir :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :  
 No identitas :  
 Suku :

Dalam hal ini selaku ketua kelompok tani .....  
 Telah memberikan persetujuan kepada anggota kami yaitu:

Nama :  
 Tanggal lahir :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :  
 No. identitas :  
 Suku :

Untuk mengadakan pembiayaan/ pinjaman kepada LKM-A "HARAPAN BUNDO". Bila dikemudian hari terjadi permasalahan dari anggota kami. Maka kami bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikannya.

Demikian surat rekomendasi dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk lintah, .....2009

Yang Menerima Rekomendasi

Yang mrembuat Rekomendasi  
Ketua Kelompok Tani .....

(.....)

| (.....)

Mengetahui  
Kertua Gapoktan Harapan Bundo

(.....)

LEMBAGA KEUANGAN MUDA AGRIBISNIS  
HARAPAN BUNDO

Sekretariat : Karang Ganting No 10 RT 01 RW01 Kel. Lubuk Lintah

DATA PERMOHONAN PEMBIAYAAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

A. DATA PRIBADI

- 1. Nama : .....
- 2. Agama : .....
- 3. Tempat/ tgl. Lahir : .....
- 4. Pendidikan terakhir : .....
- 5. Alamat lengkap : .....
- 6. Status rumah : .....
- 7. Jama'ah mesjid : .....
- 8. Nama suami/ istri : .....

B. DATA USAHA

- 1. Jenis usaha : .....
- 2. Tempat usaha : .....
- 3. Modal usaha : .....
- 4. Modal sekarang : .....

C. BANTUAN

- 1. Jenis bantuan : .....
- 2. Besar pinjaman : .....
- 3. Dipergunakan untuk : .....

D. KESANGGUPAN MENGANGSUR

Sanggup mengangsur sesuai dengan tanggal yang disepakati ( sanggup/ tidak )

E. SUMBER PELUNASAN

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. A. Gaji            | B. Hasil usaha |
| 2. Jangka Waktu       | .....          |
| 3. Dipergunakan untuk | .....          |

F. 1. Tanggal pengajuan

- 2. Yang menerima : .....

Lubuk Lintah, .....

Pihak penanggung

Yang Mengajukan

( ..... )

( ..... )

92

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....  
Tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
No. Identitas : .....  
Status : .....

Telah memberikan persetujuan kepada istri/suami/anak/saudara :

Nama : .....  
Tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
Status : .....

Untuk mengadakan pembiayaan/pinjaman kepada LKM-A "Harapan Bundo". Bila dikemudian hari terjadi permasalahan dari istri/suami/anak/saudara kami, maka kami bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. Demikianlah surat persetujuan ini di buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Lintah, 2009

Yang Menerima Persetujuan

Yang Membuat Persetujuan

(.....)

(.....)

Mengetahui  
Ketua LKMA

( SYAMSURIZAL )

### RENCANA USAHA ANGGOTA ( RUA )

- 1. Nama Anggota : .....
- 2. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- 3. Alamat : RT.....RW.....Dusun/Kampung.....
- 4. Gapoktan (Nama) : .....
- 5. Rencana Usaha : .....
- 5.1. Jenis Usaha Produktif : .....
- 5.2. kode Usaha Produktif : .....
- 5.3. Volume (Hektar, ekor) : .....
- 5.4. Kebutuhan Biaya(Rp) : .....
- 5.5. Jadwal Permintaan : .....

....., .....2009

Mengetahui  
Ketua Kelompok,

Yang Mengusulkan,

(.....)

(.....)

**LAMPIRAN  
RENCANA USAHA ANGGOTA**

NAMA ANGGOTA : .....

JENIS USAHA : .....

VOLUME : .....

KEBUTUHAN BIAYA : .....

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
<b>JUMLAH</b>					

Juli 2009  
Anggota yang Mengusulkan,

(                      )

**HARAPAN BUNDO**

Sekretariat : Karang Ganting No 8 RT 01 RW01 Kel. Lubuk Lintah

**SURAT PERJANJIAN PINJAMAN**

Nomor : /LKMA-HB/PUAP/I/2012

la hari ini : , tanggal tahun , Yang bertanda tangan dibawah

Nama : Syamsurizal  
 Umur : tahun  
 Jabatan : Manejer Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Harapan

am ini bertindak atas nama LKMA selaku pengelola pinjaman bergulir dana PUAP dari Gapoktan  
 rapan Bundo Kelurahan Lubuk Lintah.  
 anjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :  
 Umur :  
 Jabatan :  
 Alamat :

am hal ini bertindak atas nama diri sendiri disebut Pihak Kedua.  
 a pihak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa:

ak Pertama telah memberikan Pinjaman Bergulir Dana PUAP kepada Pihak Kedua dan Pihak  
 ua menyatakan telah menerima uang pinjaman bergulir dari kepada Pihak Pertama.

a Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian meminjam dengan ketentuan-  
 ntuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**

1. Pihak Pertama telah memberikan pinjaman bergulir dana PUAP kepada Pihak Kedua  
 seluruhnya berjumlah sebesar Pokok Pinjam Pinjaman  
 yang diterima oleh pihak kedua akan dipergunakan untuk kegiatan usaha pertanian dalam  
 rangka meningkatkan pendapatan dan mutu kehidupan keluarga tani,

2. Pihak Pertama berkewajiban mendampingi Pihak Kedua secara berkelompok agar dapat  
 menggunakan dana pinjaman bergulir untuk mengembangkan usaha pertaniannya,  
 meningkatkan mutu kehidupan keluarga dan memperbaiki pengaturan keuangan rumah tangga.  
 Dengan demikian, dana pinjaman bergulir dapat dibayar kembali secara lancar sambil tetap  
 memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi kemajuan ekonomi dan perkembangan  
 seluruh anggota keluarga

## PASAL 2

Atas pinjaman tersebut dikenakan jasa 1,5 % tetap per- bulan dihitung dari pokok pinjaman semula.-----

## PASAL 3

Seluruh Pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu ( ) bulan, dengan cara membayar angsuran, baik pokok maupun jasa pinjaman yaitu pokok pinjaman setiap bulan ditambah jasa pinjaman sebesar \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_, selambat-lambatnya satu Minggu setelah jatuh tempo.-----

Pihak Kedua diwajibkan untuk membayar angsuran pinjaman secara lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan, sebagai cerminan ketaatan hukum dan karakter yang baik dari pihak kedua.---

Apabila pihak kedua melakukan pembayaran angsuran dalam jumlah dan waktu yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pembayaran Pihak Kedua akan diperhitungkan dengan urutan sebagai berikut: pembayaran kewajiban jasa: Rp \_\_\_\_\_ tambah denda keterlambatan sebanyak 5% dari jasa. -----

Pihak Kedua diharuskan menabung secara teratur di lembaga keuangan baik secara individu maupun kelompok, dimana tabungan tersebut juga dapat berfungsi sebagai jaminan tunai apabila ternyata terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dari jadwal yang telah disepakati. Buku tabungan pihak kedua diserahkan kepada pihak pertama disertai surat kuasa dari pihak kedua kepada pihak pertama untuk menarik sebagian atau seluruh saldo tabungan tersebut dari lembaga keuangan pengelola tabungan tersebut untuk membayar keterlambatan angsuran pinjaman Pihak Kedua.-----

## PASAL 4

Bila terjadi perselisihan berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas perjanjian pinjam-meminjam ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak dapat dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju akan diselesaikan di Kantor Pengadilan Negeri Padang, .-----

Perjanjian ini adalah perjanjian pinjam-meminjam ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga, masing-masing pihak telah membubuhkan tanda tangan dalam surat perjanjian ini.-----

Pertama

Lubuk Lintah,  
Pihak Kedua

Materai.6000

(MSURIZAL)  
KMA Harapan Bundo

( )  
Peminjam

## Lampiran 22. Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo per Bulan Selama Satu Tahun (Januari s/d Desember 2013)

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo Per Januari 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	Lisni	2.2	Saiyo Sakato	10 Jan 2013	2.500.000,-	10	2.875.000,-
2	Elinar	2.1	Saiyo Sakato	23 Jan 2013	2.000.000,-	10	2.300.000,-
3	Ratna Nengsih	2.2	Kandang Batu sakato	28 jan 2013	3.000.000,-	10	3.450.000,-

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo Per Februari 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	Andri Yanti	2.2	Saiyo Sakato	7 Feb 2013	3.500.000,-	10	4.025.000,-
2	Jamalis	1.1	Kalawi Timur	11 Feb 2013	2.500.000,-	10	2.875.000,-
3	Aprianis	1.2	Kandang Batu Sakato	14 Feb 2013	2.500.000,-	10	2.875.000,-
4	Netti Sumarni	1.1	Kalawi Timur	21 Feb 2013	5.000.000,-	10	5.750.000,-
5	Yusniar	2.1	Saiyo Sakato	28 Feb 2013	2.500.000,-	10	2.875.000,-

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo Per Maret 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	Yulisman	1.1	Saiyo Sakato	7 Mar 2013	2.500.000,-	10	2.875.000,-
2	Yosni	1.2	Saiyo Sakato	11 Mar 2013	1.500.000,-	10	1.725.000,-

Sumber : Laporan Bulanan LKM- Harapan Bundo, 2014

Lampiran 22. (lanjutan)

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo Per April 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	Nursal	1.1	Saiyo Sakato	8 Apr 2013	5.000.000,-	10	5.750.000,-
2	Sulhakim	1.1	Kalawi Timur	15 Apr 2013	2.000.000,-	10	2.300.000,-
3	Afsah	1.1	Saiyo Sakato	25 Apr 2013	2.000.000,-	10	2.300.000,-

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo per Mei 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	Irma Yulia	1.1	Kandang Batu Sakato	13 Mei 2013	1.000.000,-	10	1.150.000,-
2	Indra	1.1	Kalawi Timur	20 Mei 2013	3.000.000,-	10	3.450.000,-

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo per Juni 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	Nur Haida	2.1	Kandang Batu Sakato	10 Jun 2013	4.000.000,-	10	4.600.000,-
2	Desmawati	1.3	Kalawi Timur	10 Jun 2013	4.000.000,-	10	4.600.000,-
3	Mardiana	2.2	Kandang Batu sakato	20 Mei 2013	5.000.000,-	10	5.750.000,-

Sumber : Laporan Bulanan LKM-A Harapan Bundo, 2014

Lampiran 22. (lanjutan)

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo per Juli 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	M. Yaniz	1.1	Saiyo Sakato	4 Jul 2013	3.000.000,-	10	3.450.000,-

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo per Agustus 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	Nurhemiwati	1.1	Saiyo sakato	22 Aug 2013	3.000.000,-	10	3.450.000,-

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo per September 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	Azhar	1.1	Saiyo sakato	1 Sep 2013	5.000.000,-	10	5.750.000,-
2	Irwan	1.1	Saiyo Sakato	5 Sep 2013	5.000.000,-	10	5.750.000,-
3	Pipit Sri Yunita	2.1	Saiyo sakato	9 Sep 2013	2.500.000,-	10	2.875.000,-
4	Sutrisno	1.3	Kalawi Timur	9 Sep 2013	5.000.000,-	10	5.750.000,-

Sumber : Laporan Bulanan LKM-A Harapan Bundo, 2014

## Lampiran 22. (lanjutan)

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo per Oktober 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	Suardi	2.2	Kandang Batu Sakato	28 Okt 2013	10.000.000,-	10	11.500.000,-

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo per November 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	Syafril	1.1	Kandang Batu Sakato	11 Nov 2013	4.000.000,-	10	4.600.000,-
2	Lasmita Sari	2.1	Kandang Batu Sakato	18 Nov 2013	4.000.000,-	10	4.600.000,-

**Register Pinjaman LKM-A Harapan Bundo per Desember 2013**

No	Nama Debitur	Kode usaha	Kelompok Tani	Tanggal Realisasi	Besar Pembayaran (Rp)	Pengembalian	
						Tempo (bln)	Jumlah (Rp)
1	Suwirman	1.1	Saiyo Sakato	2 Des 2013	1.500.000,-	10	1.725.000,-
2	Cadri	1.1	Saiyo Sakato	18 Des 2013	3.000.000,-	10	3.450.000,-
3	Zarni	2.2	Saiyo Sakato	23 Des 2013	3.000.000,-	10	3.450.000,-
4	Lisma	1.1	Saiyo Sakato	26 des 2013	1.500.000,-	10	1.725.000,-

Sumber : Laporan Bulanan LKM-A Harapan Bundo, 2014

lampiran 23. Rata-rata Besar Pinjaman yang Diterima oleh Anggota yang Memperoleh Bantuan Modal Usaha dari LKM-A Harapan Bundo (Januari s/d Desember 2013)

Bulan	Jumlah Petani (orang)	Besar Pinjaman (Rp)	Rata-rata Per Orang (Rp)
Januari	3	7.500.000,-	2.500.000,-
Februari	5	16.000.000,-	3.200.000,-
Maret	2	4.000.000,-	2.000.000,-
April	3	9.000.000,-	3.000.000,-
Mei	2	4.000.000,-	2.000.000,-
Juni	3	13.000.000,-	4.333.333,-
Juli	1	3.000.000,-	3.000.000,-
Agustus	1	3.000.000,-	3.000.000,-
September	4	17.500.000,-	4.375.000,-
Oktober	1	10.000.000,-	10.000.000,-
November	2	8.000.000,-	4.000.000,-
Desember	4	9.000.000,-	2.250.000,-
Total	31	104.000.000,-	
Rata-rata	2	8.666.666,-	

Sumber : Laporan Bulanan LKM-A Harapan Bundo, 2014 (data diolah)

Lampiran 24. Pendapatan yang Diterima dan Biaya yang Dikeluarkan oleh LKM-A Selama Satu Tahun ( Januari s/d Desember 2013)

Uraian	Jumlah per Bulan						
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
<b>Pendapatan :</b>							
- Penggantian Biaya Adm	95.000	185.000	40.000	90.000	40.000	130.000	30.000
- Jasa Pinjaman	730.000	1.025.000	822.500	282.500	470.000	962.500	447.500
- Denda Pinjaman	0	47.000	35.000	22.000	32.000	22.000	23.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>825.000</b>	<b>1.257.000</b>	<b>897.500</b>	<b>394.500</b>	<b>542.000</b>	<b>1.114.500</b>	<b>500.500</b>
<b>Biaya Operasional</b>							
- ATK	20.000	55.000	100.000	0	75.000	0	0
- Konsumsi	30.000	30.000	30.000	54.000	30.000	50.000	73.000
- Sewa gedung	0	0	0	0	1.250.000	0	0
- Lainnya	90.000	46.000	43.000	100.000	25.000	200.000	25.000
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>140.000</b>	<b>131.000</b>	<b>173.000</b>	<b>154.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>250.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Biaya Tetap</b>							
- Tenaga Kerja	612.500	612.500	612.500	612.500	612.500	612.500	612.500
- Transportasi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Total Biaya Tetap</b>	<b>712.500</b>	<b>712.500</b>	<b>712.500</b>	<b>712.500</b>	<b>712.500</b>	<b>712.500</b>	<b>712.500</b>
<b>Total Biaya</b>	<b>852.500</b>	<b>843.500</b>	<b>885.500</b>	<b>866.500</b>	<b>2.092.500</b>	<b>962.500</b>	<b>810.500</b>
<b>Total Laba/Rugi Bersih</b>	<b>(27.500)</b>	<b>413.500</b>	<b>12.000</b>	<b>(472.000)</b>	<b>(1.505.500)</b>	<b>152.000</b>	<b>(310.000)</b>

Sumber : laporan Bulanan LKM-A Harapan Bundo, 2014 (data diolah).

## Lampiran 22. Lanjutan

Uraian	Jumlah per Bulan					Total	Rata-rata
	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
<b>Pendapatan :</b>							
- Penggantian Biaya Adm	50.000	200.000	100.000	105.000	25.000	1.040.000	86.666,67
- Jasa Pinjaman	717.000	760.000	385.000	415.000	535.000	9.392.500	782.708,33
- Denda Pinjaman	0	10.000	0	0	0	202.500	16.875
- Bunga Bank							
<b>Total Pendapatan</b>	<b>767.000</b>	<b>970.000</b>	<b>485.000</b>	<b>520.000</b>	<b>560.000</b>	<b>10.635.000</b>	<b>886.250</b>
<b>Biaya Operasional</b>							
- ATK	0	12.000	0	0	0	262.000	21.833,33
- Konsumsi	25.000	35.000	15.000	20.000	20.000	421.000	34.333,33
- Sewa gedung	0	0	0	0	0	1.650.000	1.650.000
- Lainnya	92.000	50.000	50.000	40.000	49.000	1.488.000	91.580,58
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>117.000</b>	<b>97.000</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.821.000</b>	<b>318.416,67</b>
<b>Biaya Tetap</b>							
- Tenaga Kerja	612.500	612.500	612.500	612.500	612.500	7.350.000	612.500
- Transportasi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000	100.000
<b>Total Biaya Tetap</b>	<b>712.500</b>	<b>712.500</b>	<b>712.500</b>	<b>712.500</b>	<b>712.500</b>	<b>8.550.000</b>	<b>712.500</b>
<b>Total Biaya</b>	<b>829.500</b>	<b>809.500</b>	<b>714.500</b>	<b>772.500</b>	<b>732.000</b>	<b>12.371.000</b>	<b>1.030.916,4</b>
<b>Total Laba/Rugi Bersih</b>	<b>(61.500)</b>	<b>160.500</b>	<b>(229.500)</b>	<b>(252.500)</b>	<b>(172.000)</b>	<b>(1.736.000)</b>	<b>(144.666,67)</b>

Sumber : laporan Bulanan LKM-A Harapan Bundo, 2014 (data diolah)

mpiran 25. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan LKM-A Harapan Bundo

**1. Rasio Likuiditas**

i. Rasio Jangka Pendek

$$\text{Rasio Jangka Pendek} = \frac{\text{Jumlah Aset Jangka Pendek}}{\text{Jumlah Hutang Jangka pendek}}$$

$$\text{Rasio Jangka pendek} = \frac{116.074.950}{5.679.950} = 20,44 \times 100 \% = 2044 \%$$

Rasio	Nilai
$r > 100 \%$	3
$r = 100 \%$	2
$r < 100 \%$	1

$$r = 2044\% \rightarrow \text{nilai 3}$$

ii. Rasio Cepat

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Jumlah aset jangka pendek} - (\text{persediaan} + \text{inventaris})}{\text{Jumlah Utang Jangka Pendek}}$$

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{116.074.950 - 3.890.000}{5.679.950} = 19,75 \times 100\% = 1975 \%$$

Rasio	Nilai
$r > 100 \%$	3
$r = 100 \%$	2
$r < 100 \%$	1

$$r = 1975\% \rightarrow \text{nilai 3}$$

**2. Rasio Solvabilitas**

i. Rasio Modal dengan Total Aktiva

$$\text{Rasio Modal dengan Total Aktiva} = \frac{\text{Modal}}{\text{Total Aktiva}}$$

$$\text{Rasio Modal dengan Total Aktiva} = \frac{114.285.000}{119.964.000} = 0,95 \times 100\% = 95\%$$

Rasio	Nilai
$r > 100 \%$	3
$r = 100 \%$	2
$r < 100 \%$	1

$$r = 95\% \rightarrow \text{nilai 1}$$

mpiran 25. (lanjutan).

ii. Rasio Modal Bersih

$$\text{Rasio Modal Bersih} = \frac{\text{Jumlah semua Harta}}{\text{Jumlah Semua Hutang}}$$

$$\text{Rasio Modal Bersih} = \frac{119.964.950}{5.679.950} = 21,12 \times 100\% = 2112$$

Rasio	Nilai
$r > 100 \%$	3
$r = 100 \%$	2
$r < 100 \%$	1

$r = 2112 \% \rightarrow$  nilai 3

3. Rasio Profitabilitas

i. Rasio Operasional

$$\text{Rasio Operasional} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Operasional}}{\text{Jumlah Penerimaan Kotor}}$$

$$\text{Rasio Operasional} = \frac{3.821.000}{10.635.000} = 0,3592 = 35,92 \%$$

Rasio	Nilai
$r >$ standar yang ditetapkan	3
$r =$ standar yang ditetapkan	2
$r <$ standar yang ditetapkan	1

$r = 35,92 \% \rightarrow$  nilai 3

ii. Rasio Tetap

$$\text{Rasio Tetap} = \frac{\text{Pengeluaran Tetap}}{\text{Jumlah Penerimaan Kotor}}$$

$$\text{Rasio tetap} = \frac{8.550.000}{10.635.000} = 0,8039 = 80,39 \%$$

Rasio	Nilai
$r >$ standar yang ditetapkan	3
$r =$ standar yang ditetapkan	2
$r <$ standar yang ditetapkan	1

$r = 80,39 \% \rightarrow$  nilai 3

mpiran 25.(lanjutan).

iii. Rasio Kotor

$$\text{Rasio kotor} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran}}{\text{Jumlah penerimaan kotor}}$$

$$\text{Rasio kotor} = \frac{12.371.000}{10.635.000} = 1.16 = 100,16 \%$$

Rasio	Nilai
$r >$ standar yang ditetapkan	3
$r =$ standar yang ditetapkan	2
$r <$ standar yang ditetapkan	1

$$r = 100,16 \% \rightarrow \text{nilai 1}$$

4. Rasio Produktivitas Penanaman Modal

i. Rasio Hasil Investasi Modal

$$\text{Rasio Hasil Investasi Modal} = \frac{\text{Penerimaan kotor}}{\text{Investasi rata-rata modal}}$$

$$\text{Rasio Hasil Investasi Modal} = \frac{10.635.000}{120.819.450} = 0.08$$

$$\text{Investasi Rata - rata Modal} = \frac{\text{Kekayaan LKMA awal} + \text{Akhir Tahun}}{2}$$

$$\text{Investasi Rata-rata Modal} = \frac{121.700.950 + 119.964.950}{2} = 120.819.450$$

Rasio	Nilai
$r > 1$	3
$r = 1$	2
$r < 1$	1

$$r = 0.08 \rightarrow \text{nilai 1}$$

ii. Tingkat Hasil Investasi Modal

$$\text{Tingkat Hasil Investasi Modal} = \frac{\text{Hasil bersih Investasi Modal}}{\text{Rata-rata Investasi Modal}}$$

$$\text{Tingkat Hasil investasi Modal} = \frac{1.736.000}{120.819.000} = 0,014 = 1,4 \%$$

mpiran 25. (lanjutan).

Hasil Bersih Investasi Modal = ( Pendapatan Bersih LKM-A + Bunga yang dibayar) – ( Balas  
jasa manajemen)

$$\text{Hasil Bersih Investasi Modal} = \{ *(12.371.000 - 10.635.000) + 0 \} - (0) \\ = - 1.736.000$$

Ket : LKM-A harapan Bundo mengalami kerugian sebesar Rp 1.736.000

Rasio	Nilai
$r > 20 \%$	3
$r = 20 \%$	2
$r < 20 \%$	1

$r = 1,4 \%$  → nilai 1